BUMN UNTUK INDONESIA

IndonesiaRe

Transformation Business for **Sustainable Insurance**

2021

Benedictus M. Waworuntu
Direktur Utama

Sambutan **Direksi**

[GRI 102-14] [POJK A.1] [POJK D.1]

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan, sehingga PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dapat melalui tahun 2021 walaupun dengan hasil yang belum sesuai harapan.

Pada tahun 2021 ini pandemi COVID-19 telah memasuki periode tahun kedua melanda Indonesia dan dampaknya sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi di tahun 2021. Efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional memang tidak secara langsung memulihkan kondisi ekonomi nasional, namun lebih menitikberatkan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan ketika pandemi mereda maka perekonomian Indonesia sudah siap untuk bangkit.

Komitmen Keberlanjutan

Setelah UN Climate Summit COP26 di Glasgow pada akhir tahun 2021. Dengan terpilihnya Indonesia untuk memegang tampuk kepemimpinan Presidensi G20, kita semua harus siap mendukung penuh upaya negara untuk menjalankan peranan prestisius tersebut. Tiga prioritas utama Presidensi G20 Indonesia adalah penguatan sektor kesehatan, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi, dan transisi energi yang ramah lingkungan. Sehingga, isu lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) menjadi pembahasan yang intensif di kalangan masyarakat global.

Indonesia Re berkomitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai nilai yang sangat penting bagi kami. Indonesia Re terus berusaha melakukan perbaikan pada semua unit kerja, peningkatan kinerja perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen secara berkesinambungan.

Implementasi GCG tidak hanya sekadar upaya pemenuhan terhadap regulasi, akan tetapi merupakan kesadaran internal untuk membuat perusahaan hidup dalam kondisi bisnis yang sehat, bertanggung jawab dan berdaya tahan tinggi dalam menjawab tantangan bisnis. Implementasi GCG sudah menjadi sebagai well governed company. Penerapan praktik GCG telah ditetapkan sebagai salah satu indikator dalam Key Performance Indicator (KPI) yang tercantum dalam Kontrak Manajemen Direksi.

Aset tumbuh sebesar 6,04 %, ekuitas turun sebesar 19,72 %, Risk Based Capital 145,38 %, Tingkat Kesehatan Perusahaan memperoleh skor 51,00 digolongkan dalam kondisi "KURANG SEHAT" kategori "BBB" serta hasil Assessment penerapan GCG tahun 2021 memperoleh skor 90,93 % dengan klasifikasi "Sangat Baik".

Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi untuk Bisnis Berkelanjutan

Peran kami dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah menyiapkan program. Kami mendapat masukan cukup besar mulai dari modeling-nya dan skemanya seperti apa. Dalam praktiknya, industri asuransi bertindak sebagai penjamin dan membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi reasuransi. Di sini, Indonesia Re menjadi advisor dan juga operator dalam melihat dan memantau kondisi penjaminan seperti exposure risiko dan klaim yang sudah terjadi ataupun potensi klaim. Selain itu, memantau tingkat risiko relatif terhadap imbal jasa penjaminan yang kemudian menentukan nilai imbal jasa yang tepat untuk risiko default yang terjadi. Jadi secara umum untuk skema penjaminan UMKM bisa seperti sekarang capaiannya karena kontribusi besar dari asuransi dan reasuransi.

Pada tahun ini COVID-19 masih melanda sehingga premi asuransi kesehatan mengalami kenaikan sebesar 7,5 % year per year menjadi Rp 9,5 triliun sampai dengan bulan Mei 2021. Terutama pada lini asuransi, angka tersebut secara konsisten tumbuh positif di tengah masa pandemi. Kenaikan angka tersebut dapat dipicu oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah adanya faktor daya beli masyarakat yang makin meningkat sebagai hasil dari atas program ekonomi Pemerintah yang telah dijalankan sehingga penjualan asuransi atau bisnis proteksi ikut meningkat. Diharapkan kenaikan ini akan terus berlangsung hingga dapat memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif hingga akhir tahun 2021.

Tantangan yang dihadapi

Banyak kendala yang kami hadapi pada tahun ini, terutama di Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada awal pengerjaan program, kami *struggling* untuk meyakinkan perbankan dan pelaku usaha. Ketika sudah mulai berjalan pun banyak stakeholder membutuhkan penjelasan bagaimana skemanya, operasionalnya, pengukuran risiko, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan skema ini merupakan skema yang baru, di mana ada penjaminan dengan reasuransi. Banyak yang menganggap Pemerintah terlalu dermawan. Skema ini juga banyak yang mengawal dari mulai KPK, BPK, dan BPKP.

Tantangan lain yang kami hadapi pada tahun ini adalah meningkatnya Severity Klaim Bonding akibat pandemi COVID-19. Beberapa proyek mengalami keterlambatan atau belum selesai pengerjaan hingga sekarang, salah satu contohnya proyek LRT. Menurut rencana, LRT ini mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan nilai proyek hampir Rp30 triliun, namun kenyataannya merujuk pada laman website KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) proyek tersebut masih dalam proses konstruksi. Peningkatan fenomena proyek tertunda atau dihentikan selama pandemi akan merugikan industri asuransi, khususnya yang bergerak di sektor penjaminan (bisnis bonding), karena peningkatan klaim yang signifikan menyebabkan lini bisnis penjaminan berpotensi tidak profitable lagi beberapa tahun mendatang.

Apresiasi dan Penutup

Kami berupaya menjaga pencapaian bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama Direksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas dukungan, masukan dan kerja sama yang terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2021.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, nasabah, maupun mitra kerja. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan semoga kerja sama yang baik dapat terus tercipta ke depannya.

Melalui capaian yang terjadi sepanjang 2021, Kami optimis bahwa kami mampu dan solid dalam menghadapi beragam tantangan yang akan menjadi modal untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional serta mampu menciptakan peluang dan kesempatan baru untuk terus tumbuh dan berkelanjutan.

Benedictus M. Waworuntu

Direktur Utama

Ikhtisar
Keberlanjutan

Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi [POJK B.1]

Uraian	2020	2021	
Total Aset Satuan: Juta Rupiah	10.491.571	11.125.019	6.04%
Total Ekuitas Satuan: Juta Rupiah	3.429.624	2.753.379	19,72 %
Laba (Rugi) tahun berjalan di atribusikan kepemilik entitas Induk Satuan: Juta Rupiah	104.051	(517.858)	497,69 %
Return on Assets Satuan: Persen	0,94 %	(5,25 %)	-6,20 %
Rasio kecukupan Investasi (RKI) Satuan: Persen	152,42 %	137,48 %	14,94 %

Operasional

Uraian	2020	2021
Ratio Rationale dari Pefindo	idAA	idAA

Uraian	2020	2021
Peringkat Nasional Jangka Panjang dari Fitch Rating	idAA	idAA
Customer Engagement Index (CEI)	3,90	3,73
Customer Dissatisfaction Index (CDI)	1,99	1,03

Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial [POJK B.3]

Aspek Kinerja Performance Aspect	2019	2020	2021
Kesetaraan perempuan Satuan: Orang	38,49 %	38,35 %	41,07 %
karyawan baru Satuan: Orang	2	2	9

Daftar Isi

02 **Sambutan Direksi**

05 **Ikhtisar Keberlanjutan**

11 **Peristiwa Penting**

15 **Tentang Indonesia Re**

17 **Kinerja Ekonomi**

17 **Kinerja Lingkungan**

95 Kinerja Sosial

115 Tentang Laporan Keberlanjutan 2021

132 Indeks GRI

136 Indeks POJK No.51

139 Lembar Umpan Balik

Perjalanan
37 Tahun

1985

Pendirian PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1983. Perusahaan bergerak di bidang asuransi untuk mendukung pengembangan ekspor nonmigas. (30 November 1985).

2002

Seiring dengan perkembangan dan dinamika bisnis, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), membangun indentitas korporasi baru dengan perubahan logo Perusahaan dan pembangunan kultur Perusahaan yang siap menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

2013

Perubahan orientasi bisnis menjadi Perusahaan komersial dengan melebarkan sayap untuk melayani Perusahaan lain.

2014

Perubahan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero), disingkat Asei Re. Seiring dengan perubahaan nama perusahaan tersebut juga perubahan logo baru Asei Re.

PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Asei Indonesia untuk melaksanakan bisnis asuransi dan

PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re.

PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) Melakukan merger dengan PT Reasuransi Umum Indonesia Utama (Persero). Dengan demikian PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) Bubar dengan sendirinya secara hukum tanpa likuidasi.

Dengan bergabungnya PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) ke dalam PT Reasuransi Indonesia (Persero), maka anak usaha PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia secara otomatis menjadi anak usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

2015

2014

Penjaminan yang selama ini dijalankan PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) pada 9 Oktober 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marthin Aliunir, SH.

Dengan dialihkannya bisnis PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Asei Indonesia maka beralih pula seluruh kewajiban (liability) yang dimiliki. PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) menjadi perusahaan yang tidak beroperasi (non-operating company).

OJK memberikan ijin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 Desember 2014 spin off

PT Reasuransi Internasional Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan spin off divisi reasuransi syariah menjadi sebuah perusahaan Reasuransi syariah dengan nama PT Reasuransi Syariah Indonesia (RSI) dengan nama usaha ReINDO Syariah.

PT Reasuransi Internasional Indonesia melakukan merger vertikal dengan induk usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada 30 Juni 2016.

Peristiwa Penting
Tahun 2021

6 MEI 2021

Indonesia Re Insight

9 JUNI 2021

Sosisalisasi Komitmen anti penyuapan Indonesia Re Group

2 JULI 2021

BUMN di Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun bersinergi membentuk institut pembelajaran dan riset Indonesia Insurance and Pension Fund Learning Institute (IIPFLI) dan Indonesia Insurance and Pension Fund Research Institute (IIPFRI)

1 AGUSTUS 2021

Pembukaan sentra vaksinasi Indonesia Re Group & AAUI

Penghargaan

01	The Best Customer Satisfaction in Reassurance Category : Indonesia BUMN Award 2021	The Iconomics
02	The Best Brand Image : Indonesia BUMN Award 2021	The Iconomics
03	The Best Reinsurance with Great Financial Performance and Corporate Business Development : Indonesia Best Insurance Awards	Warta Ekonomi
04	Gold Award (Excellent) Category Reinsurance Company : Indonesia Finance Award	Economic Review
05	Best Brand Awareness in Reassurance Category : Indonesia Best Financial Brand Awards	The Iconomics
06	Best Brand Image in Reassurance Category : Indonesia Best Financial Brand Awards	The Iconomics
07	Outstanding Financial Performance & Company Expansion Through Business Cooperation : Indonesia Best BUMN Award	The Iconomics

BUMN
Bantua
PONDOK
BNI
mandiri

01 Tentang Indonesia Re

Tentang **Indonesia Re**

Sekilas tentang Indonesia Re

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disebut Indonesia Re merupakan perusahaan pertanggungan milik pemerintah, dimana seratus persen (100%) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara. Dalam menjalankan bisnisnya Indonesia Re selalu berusaha memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kemajuan Indonesia.
Indonesia Re didirikan dengan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia, berdasarkan Akta No. 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H. Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta. [GRI 102-1]

PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) ditunjuk untuk menjadi cangkang perusahaan reasuransi nasional dengan core business yang sebelumnya asuransi menjadi bisnis reasuransi. Hal ini sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) melalui penggabungan Perusahaan Reasuransi di Indonesia.

Setelah perubahan core business perusahaan tersebut, maka PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) bertransformasi atau berubah nama menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) atau disebut "Asei Re".

Pada tanggal 22 Desember 2014, Asei Re kemudian berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Perubahan tersebut dilakukan oleh Kementerian BUMN Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PRN dan perubahan nama tersebut tertuang dalam Akta Nomor 36 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sastriany Josoprawiro, SH., dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-13377.40.20.2014 tanggal 23 Desember 2014.

Setelah melakukan perubahan nama, pada tanggal 18 Desember 2015 Indonesia Re menerima penggabungan dari PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) (RUI) berdasarkan Akta Nomor 19 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH di Jakarta.

Penggabungan PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) merupakan cikal bakal penting dalam beroperasinya PRN. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) merupakan Induk dari PT

Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO), yaitu anak perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis reasuransi dan menjadi engine/motor penggerak PRN yang dilakukan oleh Indonesia Re.

Legalitas Perusahaan

Sejak tahun 1985, PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) lahir dan berkembang di Indonesia dengan komitmen untuk terus dapat berkembang dan meningkatkan pertumbuhan Reasuransi di indonesia.

Nama Perusahaan
[GRI 102-1]

PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Lokasi Kantor Pusat
[GRI 102-3] [POJK C.2]

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Kontak
[GRI 102-3] [POJK C.2]

Telepon : 62-21 3920101
Faksimili : 62-21 3143828
email : cosecretary@indonesiare.co.id

Bentuk Badan Hukum
[GRI 102-5]

Perseroan Terbatas

Struktur Pemegang Saham
[GRI 102-3][POJK C.2]

100%

IndonesiaRe

Bidang Usaha
[GRI 102-2]

Reasuransi Konvensional

Bidang Usaha [GRI 102-2]

Aktifitas PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terdiri dari :

01

Menyelenggarakan usaha dibidang Reasuransi Konvensional mencakup kegiatan reasuransi konvensional atau penanggungan seluruh atau sebagian risiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan / mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;

02

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan reasuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

03

Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk, Jasa, dan Target Pasar [GRI 102-2] [GRI 102-6] [POJK C.4]

Jenis Pertanggungan

Jenis produk yang kami sediakan adalah jasa pertanggungan ulang atau reasuransi yang meliputi bisnis Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa, dan hanya melayani pasar di dalam Indonesia saja.

Reasuransi Umum

Menyediakan jasa pertanggungan ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Umum yang meliputi:

Asuransi Harta Benda

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian dan atau kerusakan pada harta benda;

Asuransi Rekayasa

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian atau kerusakan yang dialami pada saat pekerjaan konstruksi atau pemasangan mesin, serta perlindungan terhadap mesin dan hasil kontruksi setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Asuransi Pengangkutan

Menyediakan penjaminan ulang (reasuransi) terhadap barang melalui suatu sarana alat angkut baik darat, laut, maupun udara sesuai dengan luas jaminan polis.

Asuransi Rangka Kapal

Memberikan proteksi reasuransi terhadap kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya akibat dari hal – hal yang dijamin dalam polis.

Asuransi Pesawat Udara

Menyediakan proteksi reasuransi pada pesawat terbang, mesin dan atau berbagai peralatan lainnya dan juga berupa jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Asuransi Motor

Memberikan jaminan reasuransi untuk kendaraan bermotor dari kerugian atau kerusakan akibat tabrakan, kecelakaan satu pihak, kebakaran dan pencurian. Jaminan ini dapat diperluas termasuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, kerusuhan, terorisme dan sabotase, banjir serta gempa bumi.

Asuransi Aneka

Jaminan reasuransi untuk Asuransi Aneka ini meliputi:

01. Asuransi Kecelakaan Diri Memberikan santunan kematian, cacat tetap (baik sebagian atau seluruhnya) cacat sementara (baik sebagian atau seluruhnya) serta santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan diri, contohnya *Personal Accident, Travel Insurance*.

02. Asuransi Kebongkaran (*Burglary*) Menjamin kerugian tertanggung atas barang-barang yang disimpan di suatu bangunan yang diasuransikan, yang diakibatkan oleh pencurian dan pembongkaran yang disertai dengan tindak pemaksaan dan perusakan.

03. Asuransi Tanggung Gugat Memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktivitas personal/perusahaan milik Tertanggung.

04. Asuransi Papan Reklame (*Billboard*) Menyediakan jaminan atas kerusakan dari Billboard (*material damage*) dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) atas obyek yang dipertanggungkan.

05. Asuransi *Hole In One* Memberikan perlindungan kepada panitia/sponsor atas hadiah yang telah ditetapkan akibat terjadinya *Hole-in- One* pada lubang yang telah ditetapkan. Pada umumnya yang dijamin dalam asuransi adalah hole dengan PAR 3.

Financial Lines

Memberikan proteksi reasuransi untuk produk asuransi kredit, Kontra Bank Garansi dan Surety Bond.

01. Asuransi Kredit Merupakan proteksi yang diberikan pihak asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan/direct loan).

02. Kontra Bank Garansi Bukti penjaminan dari Surety (perusahaan asuransi) atas bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Principal sebagaimana dipersyaratkan oleh Obligee. Dalam hal ini Surety telah terikat membayar ganti rugi kepada bank atas klaim bank garansi yang diajukan oleh *Obligee*.

03. *Surety Bond* Perjanjian 3 pihak antara Surety (Asuransi) dan Principal (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik proyek), dimana apabila Principal gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban *Principal*.

Reasuransi Jiwa

Menyediakan jasa pertanggungan ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Jiwa yang meliputi:

Life Insurance

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan atau tanpa manfaat hidup berupa nilai tunai, dana investasi, atau manfaat tahapan. Untuk produk ini, risiko yang di-cover oleh Perusahaan reasuransi adalah risiko meninggal dunianya saja, khususnya produk yang memiliki nilai tunai, unsur tabungan atau investasi.

Personal Accident

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, dan atau menderita cacat tetap total atau sebagian dan atau tertanggung membutuhkan penggantian biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit.

Critical Illness

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis yang dijamin selama masa pertanggungan.

Hospital Cash Plan

Merupakan produk asuransi kesehatan yang memberikan jaminan berupa uang santunan harian dan atau biaya pembedahan apabila tertanggung menderita sakit yang dikarenakan oleh suatu penyakit atau kecelakaan sehingga tertanggung harus dirawat inap di rumah sakit atas anjuran dokter.

Hospitalization atau Asuransi Kesehatan

Merupakan produk asuransi yang menjamin biaya-biaya perawatan kesehatan di rumah sakit ataupun dokter untuk tertanggung yang menderita sakit, baik disebabkan oleh suatu penyakit ataupun kecelakaan, baik rawat inap, rawat jalan, maternity, kaca mata dan perawatan gigi.

Asuransi Jiwa Kredit

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pembayaran sisa pinjaman tertanggung apabila tertanggung / debitur meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dalam masa asuransi, baik dengan ataupun tanpa bunga keterlambatan dan tunggakan.

Asuransi Jiwa Tabungan

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat sebesar sisa setoran bulanan hingga akhir masa asuransi atau sejumlah perkalian setoran bulanan, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap total baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Total Permanent Disability

Merupakan produk asuransi yang memberikan

manfaat apabila tertanggung menderita cacat tetap total, baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Waiver of Premium

Merupakan produk asuransi yang menjamin tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi yang harus dibayar apabila pemegang polis meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dan atau menderita penyakit kritis di dalam masa pembayaran premi asuransi.

Dalam periode laporan, tidak ada perubahan atau pergantian dalam jajaran Direksi dan Komisaris namun tidak terdapat perubahan struktur organisasi baru, tidak ada perubahan signifikan dalam perubahan lokasi, serta tidak ada pembukaan dan penutupan fasilitas. [GRI 102-10]

Visi dan Misi

[GRI 102-16] [POJK C.1]

Visi

Menjadi mitra yang kredibel dalam penyediaan solusi Reasuransi dengan kapabilitas inovasi tingkat dunia.

Misi

- Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi
- Memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah
- Meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi Indonesia

Budaya Perusahaan

[POJK F.1]

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/ MBU/07/2020 setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) SDM BUMN AKHLAK menjadi Budaya Perusahaan (*corporate culture*) yang dijadikan dasar pembentukan karakter SDM. Berikut adalah uraian dari AKHLAK.

Kami sepenuhnya menyakini bahwa bisnis asuransi adalah suatu bisnis yang didasarkan kepada kepercayaan pelanggan sehingga kami senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menumbuhkan kepercayaan dimaksud. Dengan membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan setiap insan Indonesia Re, kami yakin bisnis kami akan sustainable , oleh karena itu kami harus menjalankan nilai-nilai Perusahaan sebagai budaya kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Innovative	Melakukan pembaruan terus menerus
Nurture	Menciptakan lingkungan yang positif untuk meningkatkan kinerja bersama
Discipline	Patuh pada peraturan / Ketentuan yang berlaku
Objective	Bertindak tanpa di pengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi
Nationalism	Mencintai bangsa dan negara sendiri
Engaged	Melibatkan pelanggan untuk berkomitmen bersama
Social Awareness	Kepedulian sosial dalam membangun kepercayaan untuk meningkatkan kinerja usaha
Integrity	Karakter yang kokoh dalam menjaga kepercayaan dan kejujuran
Agility	Gesit dalam menjalankan tugas
Reliable	Dapat diandalkan
Excellence	Memiliki keunggulan

Diharapkan implementasi dari budaya atau nilai-niai Perusahaan (corporate values) yang berupa Pedoman Etika dan Perilaku merupaan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh insan Indonesia Re untuk memberikan kesatuan pandangan dalan pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

Budaya Kerja Karyawan [GRI 102-16]

Kami memiliki 7 (tujuh) perilaku yang menjadi nilai dasar yang menjadi aspek penting dalam setiap aktivitas karyawan, yaitu:

01. Antisipatif

02. Suka bekerja sama dan bersinergi

03. Berorientasi Target dan Menjadi Pemenang

04. Terus belajar

05. Berpenampilan Representatif, Tersenyum dan Komunikatif

06. Menepati Janji

07. Bekerja secara Efektif dan Tuntas.

Prinsip Kehati-hatian [GRI 102-11]

Kami juga menerapkan sistem pengendalian internal untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan rencana bisnis dan tujuan perusahaan. sehingga memenuhi kaidah-kaidah efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien mampu menyediakan informasi yang tepat bagi Direksi sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat. Tujuan penerapan sistem pengendalian internal adalah untuk menghindari penyimpangan/kesalahan prosedur dalam

Prakarsa Eksternal [GRI 102-12]

Kami berkomitmen dapat bersaing di Industri Reasuransi dengan terus melakukan inovasi setiap tahunnya. Pada tahun pelaporan kami melakukan perbaikan, perkembangan serta inovasi agar memastikan sistem yang berlaku di Perusahaan sesuai dengan standar mutu dan praktik-praktik terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kami melakukan standar mutu yang terintegrasi dengan kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

	Jenis Prakarsa Eksternal	Badan Sertifikasi	Masa Berlaku
01	ISO 20000	TUV Nord Indonesia	03 Maret 2024
02	ISO 27001	TUV Nord Indonesia	10 Januari 2024
03	ISO 37001	Asricert	12 Agustus 2023
04	ISO 9001	Sucofindo	09 November 2023

Skala Perusahaan

[GRI 102-7] [POJK C.3]

Aspek Kinerja Performance Aspect	2019	2020	2021
Jumlah Karyawan Satuan: Orang	226	219	224
Jumlah Pendapatan Satuan: Juta Rupiah	4.385.732	4.365.554	3,961,292
Jumlah Liabilitas Satuan: Juta Rupiah	6.557.176	7.061.947	8.371.640
Jumlah Ekuitas Satuan: Juta Rupiah	3,226,646	3,429,624	2,753,379
Jumlah Aset Satuan: Juta Rupiah	9.783.822	10.491.571	11.125.019
Laba Usaha Satuan: Juta Rupiah	256.134	185.498	(375.540)
Laba Tahun Berjalan Satuan: Juta Rupiah	219.840	104.052	(517.857)

Operasional kami selama tahun 2021 didukung penuh oleh karyawan tetap yang berjumlah 224 orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh kami.

Jumlah **Karyawan**

[GRI 102-8]

Karyawan Tetap

Karyawan Kontrak

	2019	2020	2021
Total	**226**	**219**	**224**

Keanggotaan pada **Asosiasi**

[GRI 102-13] [POJK C.5]

AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)
Jabatan: Member

AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)
Jabatan: Member

LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Jabatan: Member

Indonesian Senior Executives Association (ISEA)
Jabatan: Member

Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
Jabatan: Member

Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (PERUJI)
Jabatan: Member

Federation of Afro-Asian Insurers & Reinsurers (FAIR)
Jabatan: Member

Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI)
Jabatan: Member

Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMI)
Jabatan: Member

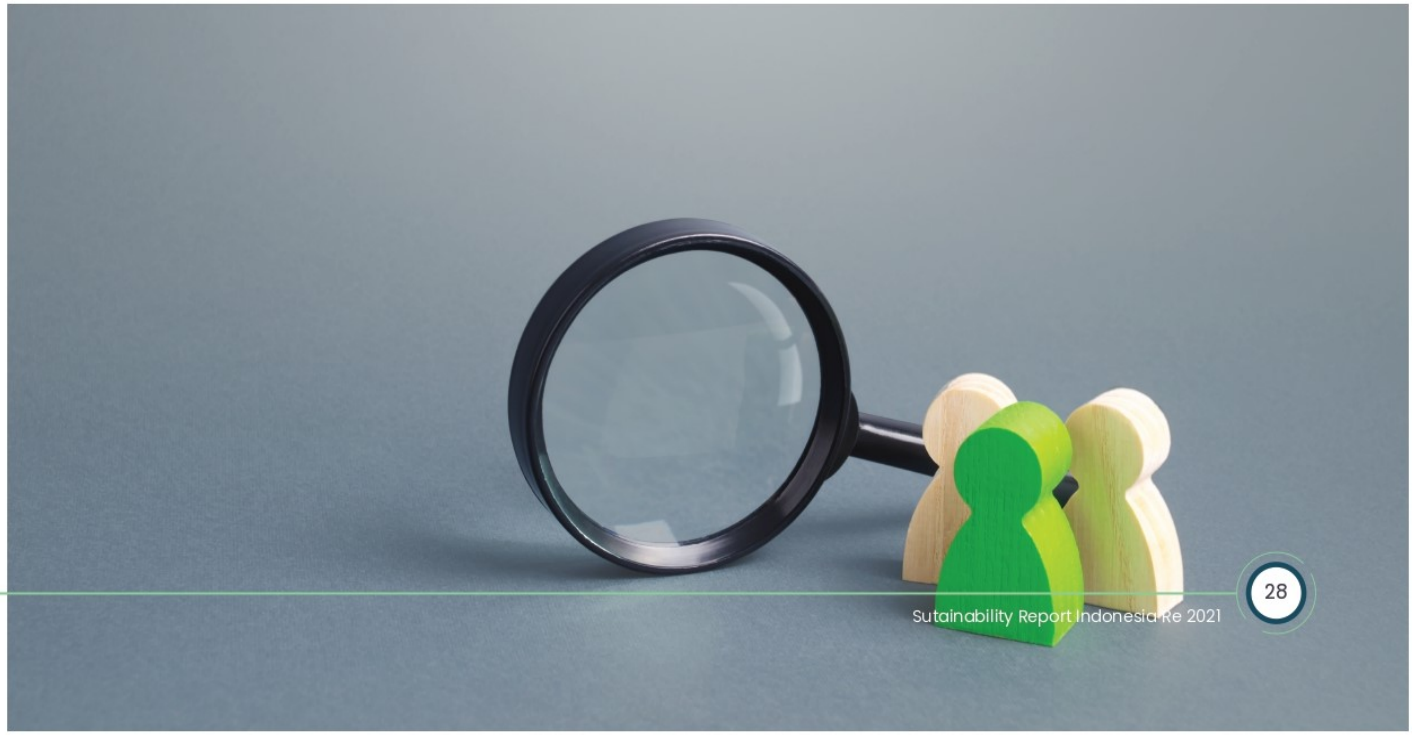

BUMN Berbagi
Ramadhan 1442 H
IndonesiaRe
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

02 Ekonomi yang Berkelanjutan

Ekonomi yang **Berkelanjutan**

Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global dan nasional. Pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menunjukkan tren yang positif. Pasar asuransi pasca pandemi pulih lebih cepat dibandingkan krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 lalu. Hal tersebut terlihat dari sisi perolehan premi, investasi, dan hasil *underwriting* yang meningkat.

Di tengah proses pemulihan ekonomi nasional, industri asuransi membukukan pertumbuhan yang cukup baik dari sisi pendapatan dan aset. Namun demikian, beban klaim industri asuransi secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya yang terkait dengan pandemi COVID-19. Demikian juga dengan industri reasuransi yang terkena dampak yang sangat besar dari pandemi COVID-19. Premi bruto masih mengalami pertumbuhan namun diikuti juga dengan kenaikan premi retrosesi dan tingginya claim incurred untuk premi yang diretensi sehingga sangat menekan Hasil Underwriting Bersih (HUB) pada Reasuransi Umum. Sedangkan pada Reasuransi Jiwa terjadi kenaikan klaim akibat dari pandemi COVID-19 yang juga menekan HUB. Permasalahan ini terjadi di industri reasuransi secara umum dan secara khusus juga terjadi pada Indonesia Re.

Berdasarkan data AAUI, pada tahun 2021 aset asuransi umum tumbuh 10,7% menjadi Rp 183,23 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 165,57 triliun. Kami pun optimis mampu mencapai atau merealisasikan target kinerja sepanjang tahun 2021, setelah melihat kinerja pada semester pertama yang telah tercapai 60 % dari Key Performance Indicator (KPI) yang berisi sejumlah target Perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP) pada 2021.

Pada semester pertama 2021, pendapatan premi Indonesia Re telah mencapai Rp 1,81 Triliun. Realisasi itu sekitar 95,43% dari pencapaian pada Juni 2020 (atau turun sekitar 4,57%). Penurunan premi terjadi di COB marine cargo, aviation, casualty, personal accident atau PA dan kendaraan bermotor. penurunan premi tersebut sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Namun di sisi lain, lini bisnis marine hull, fire dan engineering mengalami peningkatan.

Untuk mencapai target RKAP 2021, Indonesia Re juga akan fokus kepada tiga hal prioritas yaitu, memastikan keselamatan karyawan dan keluarga di tengah pandemi Covid-19, pengembangan SDM, dan penguatan teknologi informasi (IT). Selain itu, kami juga waspada terhadap lonjakan Covid-19 pada tahun ini, karena akan mengakibatkan lonjakan klaim terkait Covid-19. Karena pada tahun ini banyak Perusahaan asuransi yang merilis produk terkait dengan Covid-19 namun masih perlu diuji dalam penyelesaian klaimnya.

Sebagai organisasi yang mampu melakukan adaptasi dan penuh dengan inovasi, Indonesia Re terus berupaya untuk menyesuaikan kebiasaan baru tersebut melalui penetapan arah untuk pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penyusunan sejumlah target yang disesuaikan dengan kondisi "new normal". Melalui kebijakan dan perencanaan strategis dari berbagai aspek, kami menjadikan Indonesia Re sebagai perusahaan reasuransi yang menjadi pilihan utama dalam memberikan layanan dukungan reasuransi di Indonesia dengan dengan kualitas pelayanan yang profesional dan berstandar internasional. [GRI 103-1]

Beragam rencana strategis yang telah ditetapkan itu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terkendali, menjaga kesinambungan posisi keuangan BUMN, serta mengelola dan menciptakan sumber daya manusia unggul. Dengan begitu, kami dapat tetap tumbuh menjadi yang terbaik melalui berbagai transformasi dan inovasi sebagai upaya mencapai pertumbuhan yang baru.

Uraian	2019	2020	2021
Gross Premi	6.574.498	6.537.554	6.353.204
Aset	9.738.822	10.491.571	11.125.019
Investasi	5.197.110	5.740.513	6.007.700

Sebagai bentuk komitmen kami, inovasi yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan layanan kepada para ceding company dan memenuhi permintaan pasar. Kami mempunyai sistem yaitu Sistem Auto Pricing, yaitu sistem yang dapat menentukan harga premi secara otomatis untuk asuransi berjangka kumpulan atau Group Term Life (GTL). Inovasi ini termotivasi dari keinginan kami untuk memangkas turn around time dan meningkatkan akurasi harga premi bagi ceding company.

Indonesia Re membagi kinerja segmen operasinya menjadi dua segmen, yaitu Reasuransi Jiwa dan Reasuransi Umum. Keduanya memiliki beragam produk dan layanan yang sesuai dengan target pasar masing-masing segmen tersebut.

Kinerja Keuangan[POJK F.2]

Pada tahun 2021, Indonesia Re mencatatkan kerugian sebesar Rp 517 Milyar, atau minus sebesar 497,69 % dari pencapaian pada tahun 2020. Sedangkan total aset yang dibukukan oleh Indonesia Re mencapai Rp 11.1 triliun, dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp 10,5 triliun, telah terjadi peningkatan 6,04 %. [GRI 201-1]

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi [GRI 201-1]

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan

Uraian	2019	2020	2021
Pendapatan Premi Bruto	6.574.498	6.537.554	6.353.204

Nilai Ekonomi Langsung Yang Didistribusikan

Uraian	2019	2020	2021
Gaji dan Tunjangan Karyawan	214.950	160.869	176.537
Biaya Operasional	102.564	128.336	128.753
Imbalan Kerja	16.288	15.505	14.642
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	15.367	8.085	6.121
Dividen	0	0	0
Total Nilai Ekonomi yang Disimpan	6.225.329	6.224.759	6.027.151

Kontribusi kepada Pemerintah

Indonesia Re senantiasa mematuhi seluruh aturan yang terkait dengan operasional Perusahaan, termasuk peraturan perpajakan. Sepanjang tahun pelaporan, kami tidak menerima bantuan finansial baik secara langsung dan tidak langsung dari Pemerintah. kami juga tidak memberikan sumbangan dalam bentuk dan cara apa pun. Berikut adalah pembayaran pajak yang kami lakukan pada tahun 2021 sebagai wujud dari ketaatan sebagai wajib pajak. [GRI 201-4]

Pembayaran Pajak	2019	2020	2021
Pajak Penghasilan Badan	3.680.274.343	93.239.248	0

Praktik Pengadaan

Komitmen kami agar sebisa mungkin menjaga kearifan lokal. terlihat dalam pemenuhan tenaga kerja, kami mengutamakan karyawan yang berasal dari lokasi setempat yang diyakini memiliki pengetahuan lebih tentang kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan nilai tambah tersebut, kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kami memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga lokal yang ingin bergabung dengan Perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan demi menjaga keberlangsungan usaha kami. [GRI 102-10] [POJK C.6]

Tidak hanya mengutamakan karyawan dari lokasi atau daerah setempat saja, kami juga senantiasa menggunakan jasa dan material yang pembeliannya diutamakan dari pemasok lokal di lokasi operasional masing-masing. Pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal dilakukan dengan pertimbangan atas kualitas, harga dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. [GRI 102-9] [GRI 102-10]

03 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

kami berkomitmen agar kami bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kami beroperasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkan komitmen itu, Perusahaan menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL).

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Program TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen kami terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

sebagai BUMN, Indonesia Re juga mengikuti arahan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 Tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Implementasi TJSL Indonesia Re telah sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan seperti yang diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa

Keuangan Emiten, dan Perusahaan Publik. Kegiatan TJSL Indonesia Re telah dilakukan secara komprehensif, tidak sekadar kegiatan yang bersifat filantropi akan tetapi melekat pada setiap kegiatan operasional Perusahaan. Pelaksanaan Program TJSL kami berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan

program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL kami menjadi lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. [POJK E.5]

Kami memaknai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis Perusahaan dan minat seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders). Sebagai institusi bisnis, Tujuan Indonesia Re bukan sekadar mengejar keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. komitmen kami menjadi jiwa dari seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi nilai tambah bagi citra kami sebagai perusahaan serta tanggung jawab sosial bagi lingkungan. [GRI 103-1]

Indonesia Re mempunyai Program CSR yang merupakan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Visi dan Misi CSR

Implementasi CSR Indonesia Re memiliki tujuan utama yang diterjemahkan ke dalam visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi mitra dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, serta turut melestarikan lingkungan hidup dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Misi

- Memberikan bantuan sosial ekonomi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Perusahaan.
- Melakukan pemberdayaan keluarga-keluarga ekonomi bawah melalui pembiayaan mikro dan pelatihan serta pendampingan.
- Turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.
- Menjaga keseimbangan dari 3P (Profit, People, Planet).

Rencana Kegiatan

Salah satu upaya kamai dalam membina hubungan baik dengan masyarakat yaitu melalui pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL merupakan program yang fokus pada pengembangan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui Program TJSL, Indonesia Re turut berpartisipasi dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan

Indonesia Re membagi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bidang kemasyarakatan menjadi dua yaitu Program TJSL Pendanaan UMK dan TJSL Non-Pendanaan PUMK. Kegiatan utama Program TJSL Pendanaan UMK menyasar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial Perusahaan di bidang sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan menyalurkan

dana pinjaman bagi mitra usaha sebagai bantuan modal kerja dan pengembangan usaha.

Dalam kegiatan tersebut, Indonesia Re menggunakan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar Perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. dan juga masyarakat. komitmen kami menjadi jiwa dari seluruh aktivitas Perusahaan

Selain melaksanakan Program Pendanaan PUMK, pada 2021 Indonesia Re juga melaksanakan Program TJSL Non- PUMK dengan prioritas pada pilar pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan Hukum & Tata Kelola, serta prioritas pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) seperti TPB 1: Menghapus Kemiskinan (No Poverty), TPB 3: Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-being*), TPB 4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), TPB 11: Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*), TPB 16: Perdamaian, keadilan & kelembagaan yang tangguh (*Peace & Justice Strong Institutions*).

Program TJSL

A. Pilar Sosial	**TPB 1**	Menghapus Kemiskinan
	TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	TPB 4	Pendidikan Berkualitas
B. Pilar Ekonomi	**TPB 8**	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
C. Pilar Lingkungan	**TPB 11**	Kota dan komunitas berkelanjutan
	TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
D. Pilar Hukum dan Tata Kelola	**TPB 16**	Perdamaian, Keadilan & Kelembangaan yang Tangguh

Program Create Sharing Value

Program	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan
01 Internet gratis Indonesia Re di Kepulauan Seribu	Edukasi Asuransi kepada Siswa dan Fasilitas Internet Gratis siswa Pulau Pramuka untuk pembelajaran secara daring dan saran untuk operasional kampung digital
02 Kampung Digital Indonesia Re di Kepulauan Seribu	Edukasi Asuransi kepada masyarakat dan pembuatan Pusat Penjualan Online Terpadu untuk UKM P.Seribu dan sarana Marketing.
03 Program TJSL Penunjang Pendidikan Berkualitas di Pulau Komodo	Internet Gratis untuk siswa di Pulau Komodo untuk pembelajaran secara daring
04 Beasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA)	Melalui program beasiswa untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) akan menciptakan generasi muda pelaku bisnis asuransi yang akan menunjang kemajuan bisnis Reasuransi
05 Pembinaan Mitra Binaan dengan Pelatihan Capacity Builiding di Yogyakarta	Melalui pelatihan ini Mitra Binaan akan diberi bekal agar usahanya semakin berkembang dan juga edukasi mengenai pentingnya menggunakan asuransu jiwa jredit untuk mengcover dana PUMK yang mereka terima apabila Mitra Binaan tersebut meninggal dunia. Dari pembayaran premi asuransi tersebut. Indonesia Re menerima pertanggungan ulang dari pihak perusahaan asuransi (Seluruh Mitra Binaan Indonesia Re diwajibkan menggunakan asuransi jiwa kredit)

Manfaat dan dampak yang bisa dilihat seperti halnya beasiswa untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) akan menciptakan generasi muda pelaku bisnis asuransi yang akan menunjang kemajuan bisnis Reasuransi dan begitu juga untuk masyarakat Pulau Komodo mendapat sarana internet gratis selama 2 (dua) tahun yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan proses pembelajaran daring yang lebih baik untuk para siswa dan guru SD dan SMP sekolah di Pulau Komodo. Setelah dilakukan survey dan assessment Diknas Manggarai Barat maka untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun ini dapat dilakukan di sekolah Pulau Komodo (tahun sebelumnya UNBK dilakukan di Labuan Bajo).

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial

Sepanjang tahun 2021, realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia Re untuk TJSL (Non PUMK) adalah sebesar Rp 3.410.809.042. Penyaluran TJSL Indonesia Re tahun 2021 sebesar 97,45 % dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TJSL Tahun 2021. [GRI 203-1]

Mengacu pada penerapan kegiatan-kegiatan TJSL di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu senantiasa melakukan perbaikan serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program TJSL kami dari tahun ke tahun. [POJK F.25]

No.	Kegiatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Realisasi	Capaian
A. Pilar Sosial				
01.	**Keterangan**	**TPB 1.** Menghapus Kemiskinan	**567.331.292**	**162%**
	Bantuan Bencana NTT		163.959.738	
	Kolaborasi Program BUMN Untuk Sembako Bogor		92.143.000	
	Pengadaan Paket Sembako Ramadhan dan Idul Adha		125.002.954	
	Dana Bantuan Qurban 1442H Indonesia Re		67.000.000	
	Donasi ke Panti Asuhan		9.225.600	
	Bantuan Sosial Anak Yatim		10.000.000	
	Bantuan Perumahan untuk Karyawan Alih Daya		100.000.000	
02.	**Keterangan**	**TPB 3.** Kehidupan Sehat dan Sejahtera	**892.613.000**	**179%**
	PCR dan Swab Karyawan		706.013.000	
	Sentralisasi Vaksin I dan II		186.600.000	
03.	**Keterangan**	**TPB 4.** Pendidikan Berkualitas	**890.040.000**	**85%**
	Wakaf 1000 Musahf Alquran		55.000.000	
	Program Internet Gratis Labuan Bajo		200.000.000	

Pencairan Dana Bantuan Sinergi BUMN FBO		50.000.000	
Program Dukungan BUMN untuk Atlet Paralimpiade Tokyo		300.000.000	
Beasiswa IPB, STIMRA, STMA dan KAryawan Alih Daya		285.040.000	

B. Pilar Ekonomi

01.	**Keterangan**	**TPB 8.** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	**218.705.750**	**55%**
	Pembinaan MB melalui Webinar dengan KBI & Kel. Kopi Cilaja		5.000.000	
	Pembinaan MB dengan Pelatihan Capacity Building di Yogyakarta		52.580.000	
	Pembangunan Resto Café Pulau Pramuka		161.125.750	

C. Pilar Lingkungan

01.	**Keterangan**	**TPB 11.** Kota dan Komunitas berkelanjutan	**842.119.000**	**99%**
	Bantuan Perayaan Natal IKNB		25.000.000	
	Bantuan Renovasi Mushola Nur Hidayah Bekasi		13.300.000	
	Pembuatan Sr Report		35.000.000	
	Program Pembangunan Nasional		658.819.000	
	Program TJSL Pembangunan Masjid Unisa Yogyakarta		100.000.000	
	Program Green Paket B 2021 Konservasi Alam		10.000.000	
	Total TPB per Pilar Program TJSL		**3.410.809.042**	**97,45%**

Menangani Keluhan dan Pengaduan Masyarakat [POJK F.24]

Untuk memastikan komitmen kami kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana, kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi berjalannya kegiatan-kegiatan Perusahaan. Jika terdapat keluhan yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perusahaan, pemangku kepentingan dapat menyampaikannya melalui nomor contact center (021) 392-0101. Selain itu pengaduan juga dapat disampaikan melalui cosecretary@indonesiare.co.id. Sarana pengaduan ini dikelola oleh Unit Humas Group Sekper.

Selama tahun 2021, kami tidak mendapat laporan pengaduan atas dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perusahaan. Kami juga tidak dikenai denda atau sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang atau peraturan.

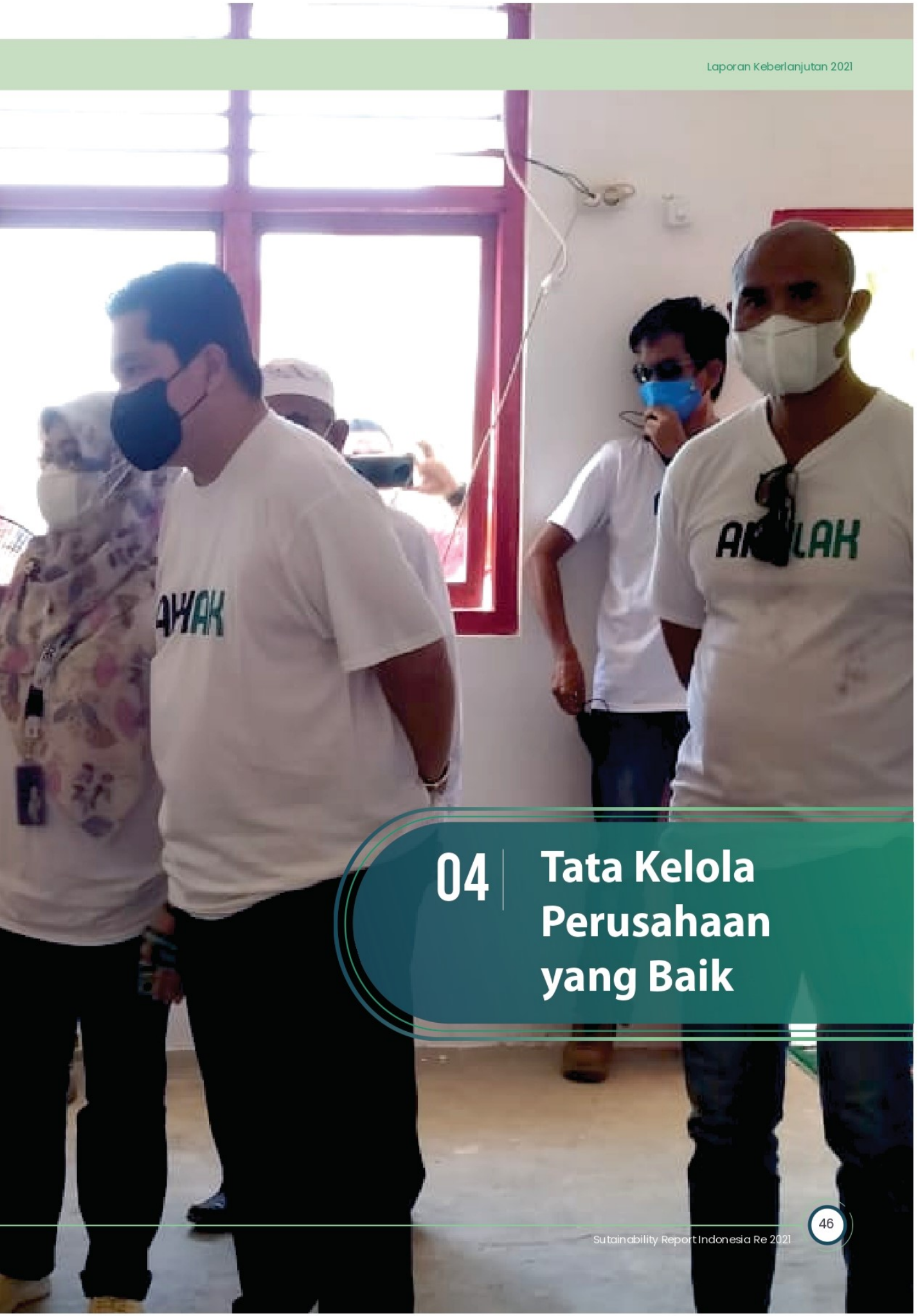

04 Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola **Perusahaan yang Baik**

Indonesia Re secara konsisten dan berkelanjutan untuk fokus pada implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) karena merupakan fondasi komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Kami menyusun dan mengimplementasikan praktik- praktik tata kelola yang dijalankan dengan standar integritas tinggi dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan mengembangkan pasar asuransi. Kami percaya bahwa GCG merupakan faktor penting dalam industri reasuransi dalam hal memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan ceding company. Implementasi GCG juga dirasakan kian penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi. [GRI 301-1]

Kami mengharapkan dapat menjadi perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh dengan mengedepankan GCG dan pengelolaan risiko yang baik. Penerapan GCG Perusahaan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

1. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Kami menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang akurat, efektif, dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai Perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan yang kami lakukan.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini mencerminkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ

sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Kami menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap karyawan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kami wujudkan dalam bentuk kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak di luar ketentuan yang telah disepakati.

4. Kemandirian

Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Korporasi. Kami menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai Perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip ini merepresentasikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menerapkan prinsip kewajaran dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

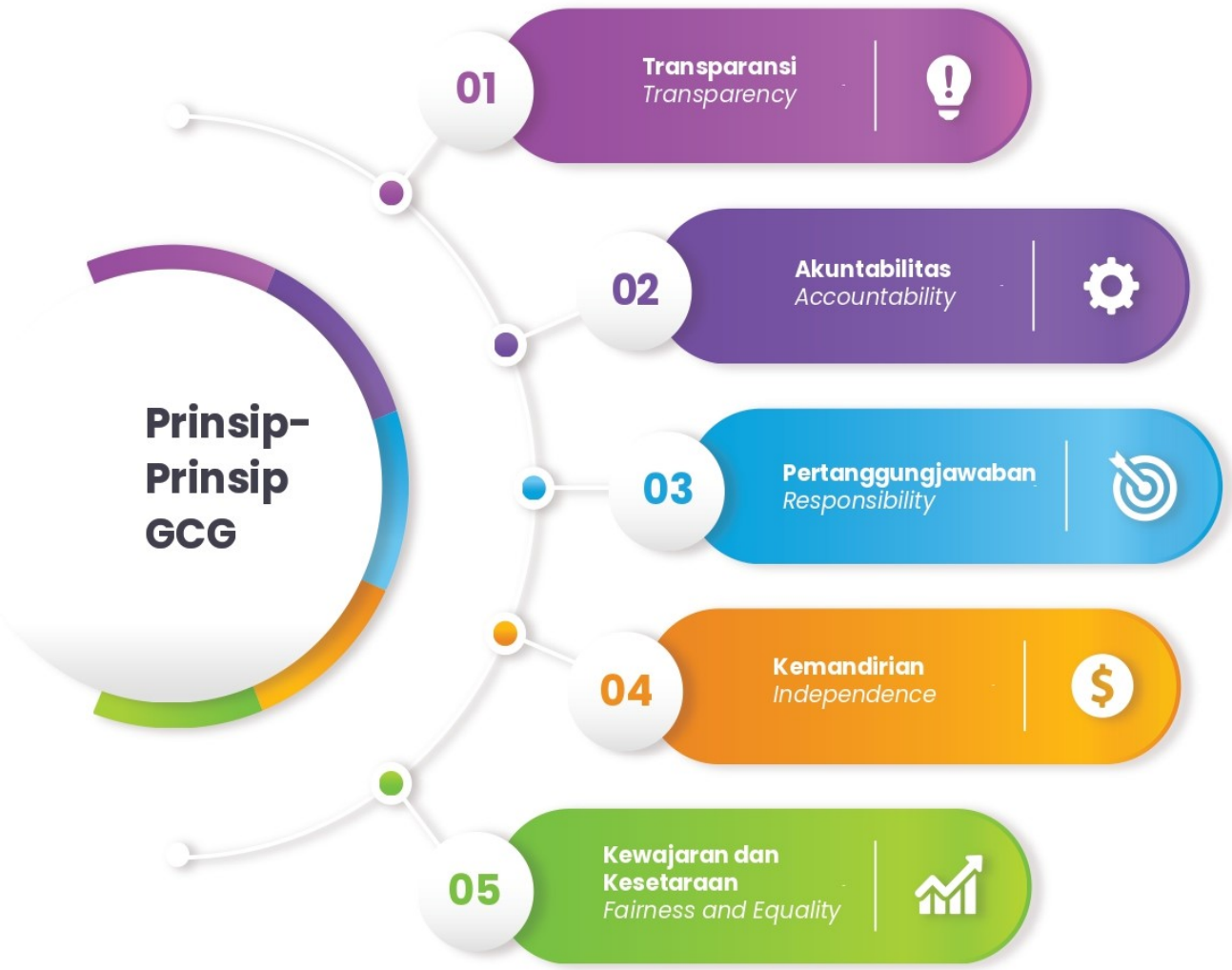
Prinsip-Prinsip GCG
01
Transparansi
Transparency
02
Akuntabilitas
Accountability
03
Pertanggungjawaban
Responsibility
04
Kemandirian
Independence
05
Kewajaran dan Kesetaraan
Fairness and Equality

Komitmen Tata **Kelola Perusahaan**

Komitmen tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan melalui langkah-langkah untuk mempromosikan dan mengelola GCG sebagai bagian penting dari budaya dan nilai-nilai untuk diadopsi oleh seluruh karyawan di semua tingkatan organisasi. Hal itu juga didukung oleh kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG antara lain dengan memiliki sejumlah pedoman yang terkait dengan GCG, yang meliputi:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GOCG)
- Pedoman Etika dan Perilaku (COEC)
- Pedoman Direksi (BOD Manual)
- Pedoman anti kecurangan (Fraud)
- Pedoman pengendalian gratifikasi
- Pedoman Pengenalan Direksi
- Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
- Piagam Dewan Komisaris dan Direksi

Dengan komitmen tinggi terhadap penerapan GCG sepanjang tahun Indonesia Re telah mencapai kinerja yang sangat memuaskan, antara lain:

> Aset tumbuh sebesar 6,04%, ekuitas turun sebesar 19,72%, Risk Based Capital 145,38%, Tingkat Kesehatan Perusahaan memperoleh skor 51,00 digolongkan dalam kondisi "KURANG SEHAT" dengan kategori "BBB" serta hasil assessment penerapan GCG tahun 2021 memperoleh skor 90,93 % dengan klasifikasi "Sangat Baik".

Struktur dan Hubungan **Tata Kelola Perusahaan**

Indonesia Re memiliki struktur organ tata kelola yang bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan perusahaan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

01

Organ utama yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

02

Organ Pendukung yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Usaha serta Komite-komite di bawah Direksi.

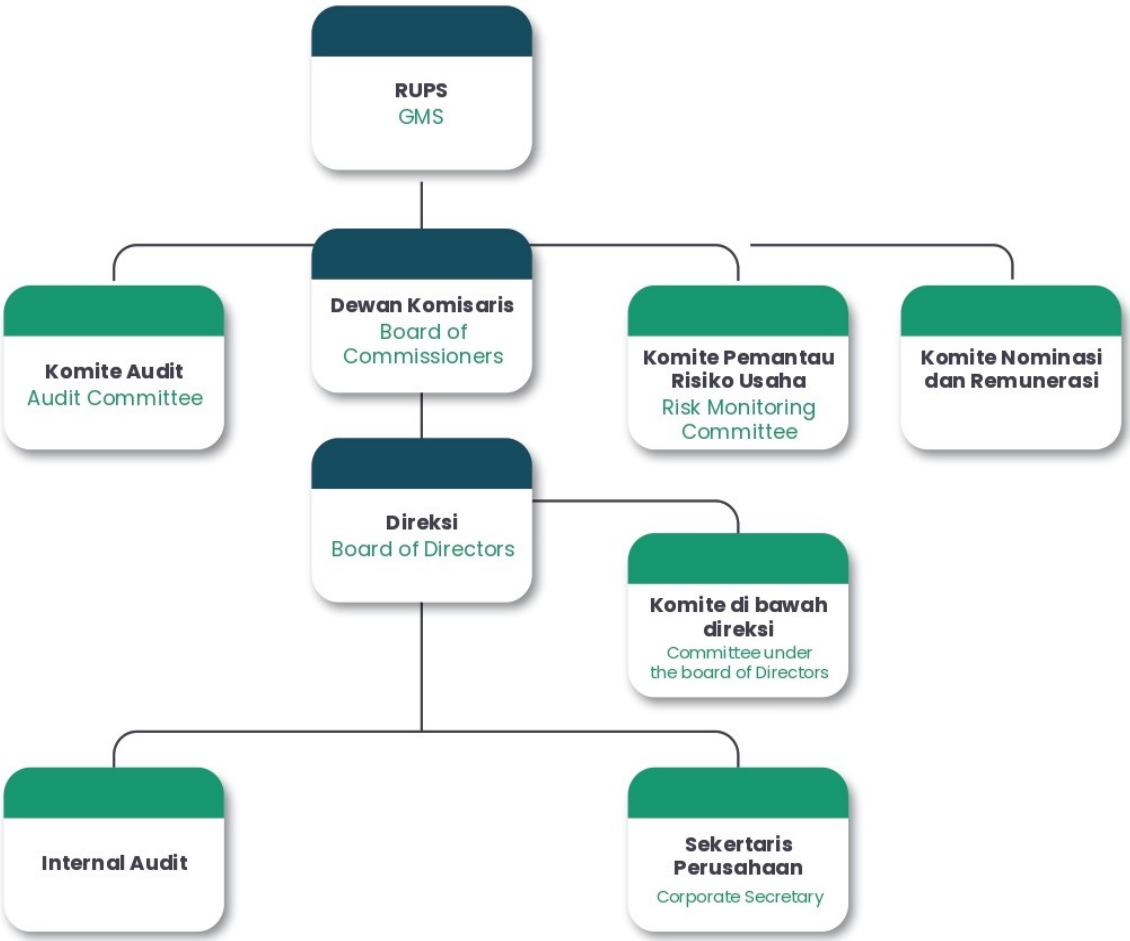
RUPS
GMS
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Komite Audit
Audit Committee
Komite Pemantau Risiko Usaha
Risk Monitoring Committee
Komite Nominasi dan Remunerasi
Direksi
Board of Directors
Komite di bawah direksi
Committee under the board of Directors
Internal Audit
Sekertaris Perusahaan
Corporate Secretary

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola sebagai forum bagi pemegang saham untuk menyetujui dan mengesahkan hal-hal penting berkenaan dengan kepentingan perusahaan, sesuai ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021 Indonesia Re menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu terdiri dari RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020 dan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.kami juga tidak memberikan sumbangan dalam bentuk dan cara apa pun. Berikut adalah pembayaran pajak yang kami lakukan pada tahun 2021 sebagai wujud dari ketaatan sebagai wajib pajak. [GRI 201-4]

Secara keseluruhan, RUPS merupakan organ yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang bersangkutan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun buku yang dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS.

Pemegang Saham

Pemegang Saham Indonesia Re adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan 100% kepemilikan saham Perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan saran dan pengawasan pada Direksi dalam menyusun strategi dan mengelola perusahaan, termasuk dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.

Direksi

Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari agar sejalan dengan tujuan perusahaan. RUPS mengangkat Direksi untuk bekerja selama jangka waktu 5 tahun yang berlangsung dari tanggal yang ditentukan pada RUPS yang bersangkutan. Setelah mencapai akhir masa jabatan maka RUPS bisa diangkat Kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tanggung jawab Direksi adalah mengelola Perusahaan secara efektif dan efisien, serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar. Direksi juga bertanggung jawab dalam pengawasan, pengelolaan, dan pemantauan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social and Corporate Governance/ ESG). [POJK E.1]

Kriteria Penilaian GCG

Indonesia Re memiliki kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian penerapan GCG, yang mencakup:

- Etika bisnis dan perilaku
- Organ perusahaan
- Pemegang saham
- Pemangku kepentingan
- Praktik usaha yang sehat
- Pernyataan penerapan pedoman GCG

Pihak yang Melakukan Penilaian

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang telah kami lakukan juga ditunjukkan dengan hasil kinerja positif pada tahun 2021. Kami membuktikan bahwa kami telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan pengelolaan risiko menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap tahunnya kami selalu melakukan assessment, Penilaian penerapan GCG kami pada tahun 2021 dilakukan secara mandiri (self-assessment), dan juga dilakukan pendampingan oleh konsultan independen yakni PT. Servitama Konsultan. Dari hasil penilaian tersebut, penerapan GCG kami pada tahun 2021 sebesar 90,93 % dengan kategori Sangat Baik.

	Aspek:	Nilai (%):
01	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	95,10
02	Pemegang saham dan RUPS / Pemilik Modal	100
03	Dewan Komisaris / Dewan Pengawas	92,10
04	Direksi	94,88
05	Pengungkapan informasi dan transparansi	95,37
	Jumlah	90,93

Kualifikasi kualitas penerapan GCG: **Sangat Baik**

Capaian skor GCG tahun 2021 tersebut meningkat 0,51 % dibandingkan dengan hasil penilaian GCG tahun sebelumnya yang memperoleh skor 90,42 %. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kami secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan aktivitas bisnis, meskipun masih terdapat sejumlah rekomendasi.

Pelaksanaan *Assessment* GCG OJK Tahun 2021

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri perasuransian, karena itu Perusahaan juga harus mentaati ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Kriteria yang Digunakan

Pelaksanaan assessment GCG OJK menggunakan kriteria yang terdapat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang terdiri dari 6 (enam) aspek dan 97 (sembilan puluh tujuh) parameter, yaitu:

	Aspek/Indikator:	Parameter
01	Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku	6
02	Organ Perusahaan	20
03	Pemegang Saham	22
04	Pemangku Kepentingan	11
05	Praktik Usaha yang Sehat	35
06	Pernyataan Penerapan Tata Kelola	3
	Jumlah	**97**

Hasil Assessment GCG OJK

Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan untuk tahun buku 2021, Perusahaan meraih skor 4,82 (skala 5) dengan klasifikasi kualitas "Sangat Baik".

Skor:	Klasifikasi kualitas:
4,82	" Sangat Baik

	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Tahun Penilaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02	Organ Perusahaan	4,43	4,47	4,47	4,47	4,62
03	Pemegang Perusahaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04	Pemangku Kepentingan	5,00	5,00	5,00	5,00	4,92
05	Praktik Usaha yang Sehat	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
06	Pernyataan Penerapan Pedoman Tata Kelola	5,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Skor Keseluruhan		4,80	4,80	4,81	4,81	4,82
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Fungsi Kepatuhan

Komitmen kami dalam mengimplementasikan aspek dan fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko kepatuhan untuk setiap aktivitas usaha dan operasional Perusahaan. Pelaksanaan tersebut mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain:

- UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- SEOJK No. 14/SEOJK.05/2016 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, direksi terlibat dalam pelaksanannya. Direksi kami berusaha menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan, Semua Direksi kami menandatangani pakta integritas untuk menjalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaannya, fungsi kepatuhan di lingkungan Kami dipimpin oleh Risk

Management & Quality Assurance Division Head. Fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai yang diatur oleh Perusahaan yakni mengelola sistem manajemen kepatuhan melalui pengintegrasian kewajiban kepatuhan dalam kebijakan prosedur dan proses untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan, sistem pelaporan dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan evaluasi kebijakan sistem manajemen kepatuhan agar efektif dan responsif terhadap perubahan yang ada.

Dalam rangka memenuhi seluruh ketentuan regulator serta praktik terbaik yang diterapkan di lingkungan kami, fungsi kepatuhan yang kami lingkungan kami, fungsi kepatuhan yang kami punya sudah memiliki sistem yang memuat seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal. Kami juga telah menjalankan sosialisasi mengenai gratifikasi bersama KPK untuk seluruh karyawan kami serta diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas. Selain itu, fungsi kepatuhan juga memiliki inisiatif baru berupaya penyusunan Indikator Kepatuhan di seluruh unit Perusahaan. Indikator Perusahaan berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

Kegiatan Kepatuhan Selama 2021

Selama tahun 2021, kami melakukan kegiatan sosialisasi di bidang kepatuhan : [GRI 205-2]

01

Uraian:
Sosialisasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tahun 2021 dilakukan pada Rabu, 09 Juni 2021 dan diikuti oleh seluruh karyawan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Tanggal Pelaksanaan:
10 – 11 Juni 2021

Jumlah Karyawan yang Mengikuti Kegiatan:
24

02

Uraian:
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan insan perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 kepada seluruh karyawan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Tanggal Pelaksanaan:
27 - 29 April 2021

Jumlah Karyawan yang Mengikuti Kegiatan:
10

Anti Pencucian Uang (APU)

Prosedur Customer Due Diligence yang kami terapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penerapan ini kami berlakukan ke semua Ceding Companies dan Mitra Kerja Luar Negeri. Kami harus memastikan bahwa klien kami memiliki legalitas dan terhindar dari bisnis Pencucian U

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. SPI mampu membantu pengendalian atas risiko yang semakin kompleks melalui proses yang terintegrasi pada tindakan dan

proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh Perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari SPI dan guna memastikan kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, maka secara khusus dibentuk Internal Audit. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsi assurance dan consultancy terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit bermitra dengan Komite lainnya. Fungsi ini juga menjalankan pola relasi koordinatif dengan Sekretaris Perusahaan. Terkait dengan cara-cara mengendalikan kondisi internal Perusahaan, Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut: ang dan Pendanaan Terorisme.

a. Menata, mengubah dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;

b. Dapat mengakses seluruh dokumen, pencatatan, karyawan, informasi objek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

c. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;

d. Berkerja sama dengan Komite Audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

e. Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-review atau diaudit, akan tetapi tanggung jawab pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.

Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan untuk mengungkapkan penyimpangan termasuk kegiatan yang mencurigakan. WBS juga menjadi sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan informasi kepada Internal Audit mengenai tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika, perselisihan, maupun melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kami.

Kami akan melindungi identitas pelapor yang melaporkan adanya Tindakan atau potensi terjadinya korupsi. Hasil *Whistleblowing system*

kami kelola dengan secara profesional dan independen. Sistem ini dibuat guna menghindari konflik atau perselisihan dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang timbul.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran akan dilakukan secara rahasia, konsisten dengan kebutuhan penyidikan lebih lanjut dan identitas dari pelapor tidak akan diungkapkan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kami menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pedoman ini berisi panduan untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia, anonim dan independen oleh para pemangku kepentingan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

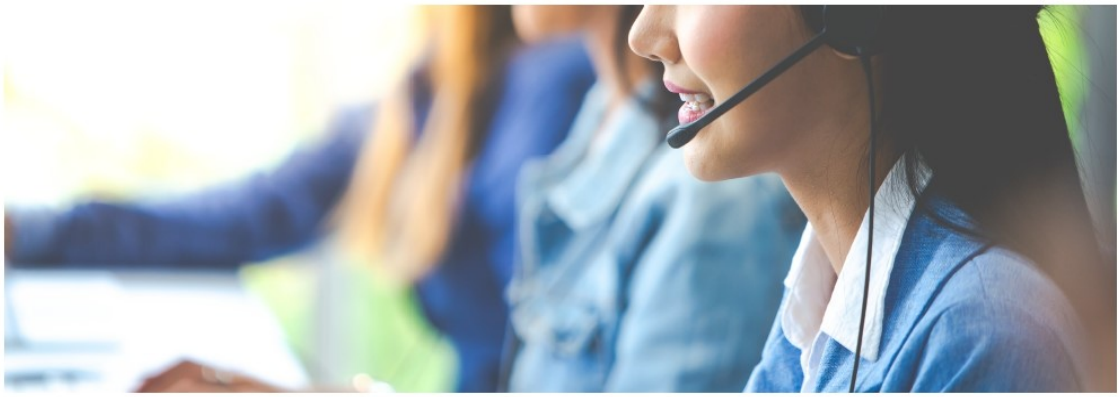

Stakeholder/whistleblower dalam menyampaikan laporan tindakan pelanggaran dapat melalui sarana yang ditujukan kepada:

Surat yang ditujukan kepada Chief Internal Audit , dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas "RAHASIA", dialamatkan ke :
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Gedung Indonesia Re
Jl. Salemba Raya No. 30
Jakarta Pusat 10430
Up: Chief Internal Audit

Email:
auditor@indonesiare. co.id

Website:
www.indonesiare.co.id
atau www.lapor.go.id

Ruang lingkup *Whistleblowing System* (WBS)

Ruang lingkup WBS yang diterapkan di lingkungan kami mencakup penyimpangan atau pelanggaran yang terkait dengan etika bisnis dan etika kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan hukum atau perundang-undangan dan perasuransian. Berikut adalah struktur pengelola WBS di lingkungan Perusahaan :

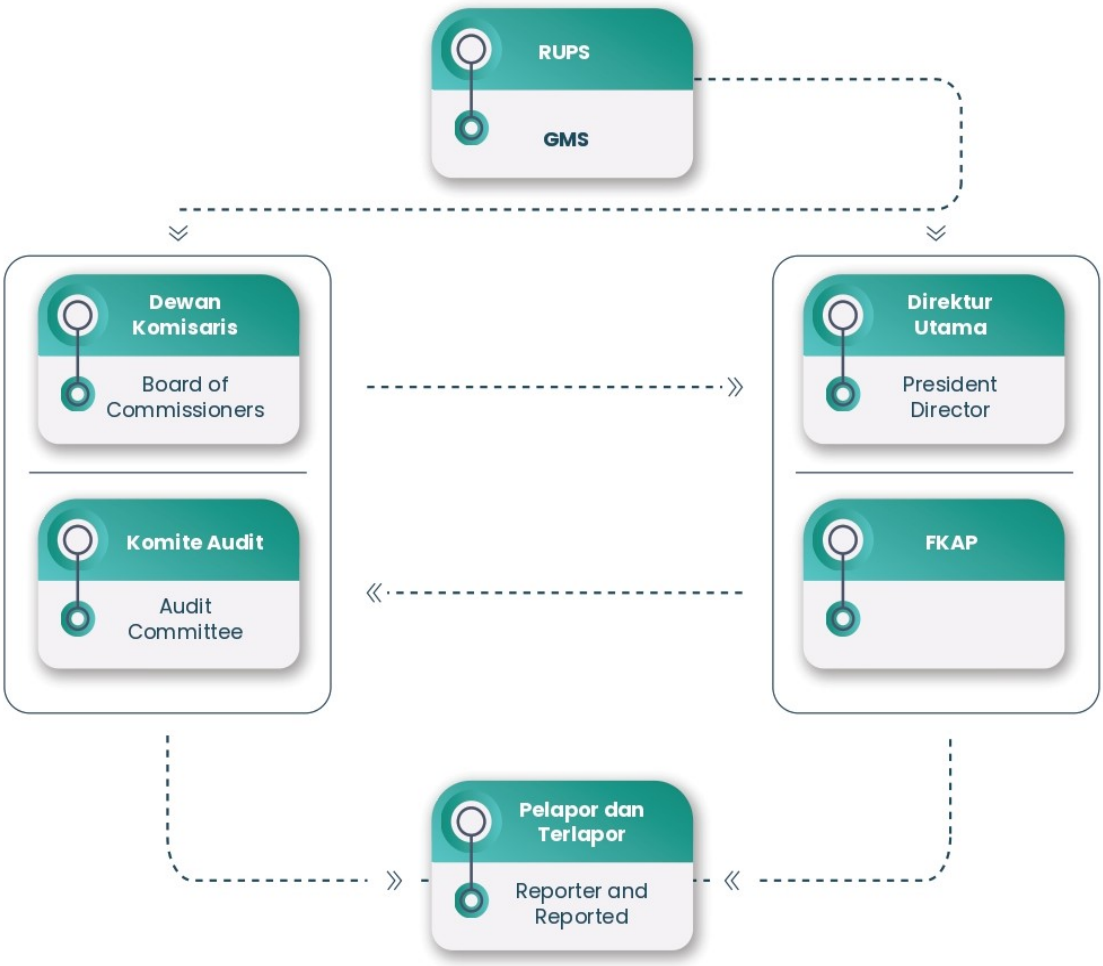

Dewan Komisaris	Organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham, mempunyai kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan, termasuk pelaksanaan Corporate Plan Perusahaan, RKAP, sesuai Akte Pendirian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direksi	Organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
Komite Audit	Bagian dari organ Dewan Komisaris di mana antara lain bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi.
Audit Internal	Organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai kami.
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	Organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan praktik enterprise risk management, terutama untuk menghadapi risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran Perusahaan.

Perusahaan akan memberikan perlindungan kepada whistleblower yang laporannya terbukti kebenarannya. Perlindungan yang diberikan oleh kami mencakup:

Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (whistle blower);

Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;

Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;

ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor; Bagi pelapor internal, kami akan memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record). Selain itu, kami juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sebagaimana ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Flow Chart Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Flow Chart

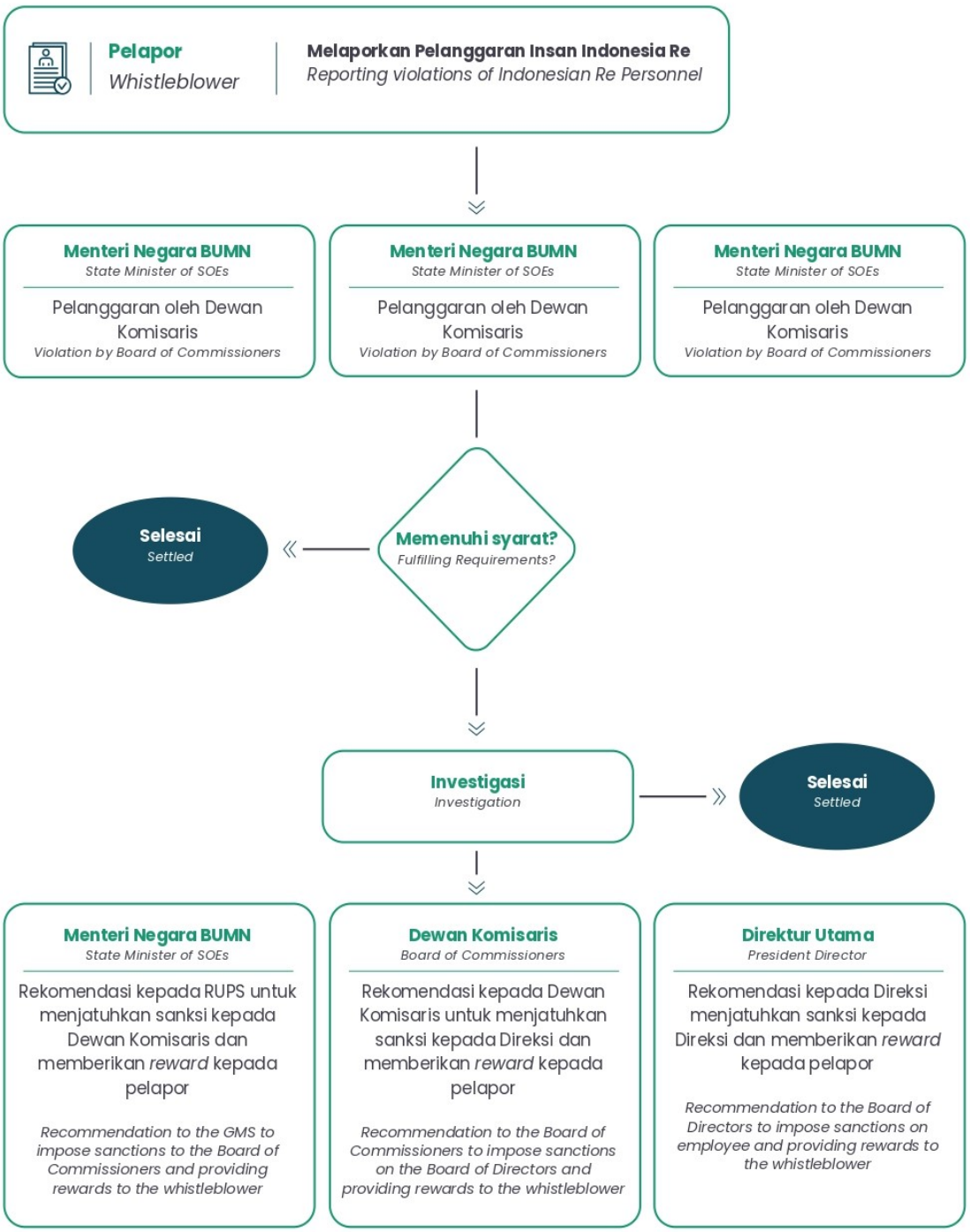

Laporan yang disampaikan tersebut diharapkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, Komite Audit akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pengaduan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan.

Sanksi bagi pelanggar

Bagi pelanggar yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran yang terkait dengan ketentuan internal Perusahaan, Indonesia Re akan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten. Komite Audit akan merekomendasikan kepada bagian Hubungan Industrial untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai peraturan Perusahaan. Dalam hal pelanggaran akan diterapkan secara kasus per kasus. Pemberian sanksi selain dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran juga sebagai peringatan kepada pihak lain yang memiliki niat akan melakukan pelanggaran.

Sosialisasi WBS

Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran wajib melakukan sosialisasi kebijakan ini minimal setahun sekali, baik kepada pegawai dan stakeholder dengan menggunakan media sebagai berikut:

Intranet Indonesia Re.

Email Internal Perusahaan.

Website Indonesia Re.

Pertemuan tatap muka yang dilakukan saat Gathering/ Training.

Khusus untuk para pelanggan, mitra kerja dan pemasok, sosialisasi akan dilakukan melalui surat edaran pemberitahuan.

Jumlah Pelanggaran WBS

Pada tahun pelaporan tidak terdapat pelanggaran WBS sehingga tidak ada sanksi/tindak lanjut atas pengaduan.

Kode Etik

Kredibilitas, kepercayaan publik, pemilik modal, dan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha kami. Jika kredibilitas kami dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) hilang maka berpotensi menekan potensi peluang bisnis yang dapat mengancam kelangsungan usaha kami.

Kredibilitas kami dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku kami dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dalam pengelolaan kami selalu patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan.

Pedoman Etika digunakan oleh seluruh karyawan kami sebagai landasan dalam membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar Perusahaan.

Pokok-pokok Kode Etik

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Conduct) yang kami susun mengandung pokok-pokok kode etik, yang terdiri dari:

Komitmen Perusahaan terhadap pemangku kepentingan, karyawan, pemegang saham, tertanggung, pemasok, customer, masyarakat dan lingkungan, mitra usaha, pemerintah, pesaing dan media massa.

Komitmen dan perilaku kerja karyawan kami sebagai atasan, bawahan, dan rekan kerja.

Etika bisnis perusahaan.

Penerapan dan penegakan Pedoman Etika dan Perilaku.

Pernyataan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik berlaku bagi seluruh level organisasi dan seluruh karyawan Perusahaan. Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, kami mewajibkan bagi setiap karyawan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik kami telah disebarluaskan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan. Penyebarluasan dan Sosialisasi atas Kode Etik Perusahaan dimaksudkan untuk mendukung kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap perilaku-perilaku yang sesuai dengan peraturan yang mengikat tersebut.

Setiap karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik dan menandatangani pernyataan untuk mematuhi seluruh isi Kode Etik Perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil laporan HCCS Division yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Pada tahun pelaporan tidak terdapat pelanggaran kode etik. [GRI 205-3]

Pemberian Dana Kegiatan Politik

Kami tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik mana pun. Meskipun demikian, kami menjamin seluruh karyawan kami untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Program Anti Korupsi

Kami menilai bahwa korupsi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Korupsi juga bertentangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, kami menerapkan kebijakan anti korupsi yang diberlakukan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali didasari oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai bentuk komitmen kami dalam menerapkan Anti korupsi, kami juga melakukan pelatihan dan komunikasi anti korupsi kepada karyawan. Kami juga rutin melakukan sosialisasi anti penyuapan dan korupsi serta kebijakan kode etik kepada seluruh karyawan Indonesia Re dalam bentuk blasting email secara regular. [GRI 103-1]

Level Jabatan	Jumlah Karyawan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	%
Kadiv	13	13	100%
Kadep	35	35	100%
KaUnit	67	67	100%
Staf	72	72	100%
Kontrak	37	37	100%
Jumlah	**224**	**224**	**100%**

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kami memiliki dua pedoman yang harus dipatuhi terkait dengan pengendalian keuangan, yaitu:

Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini memberikan panduan kepada seluruh insan Indonesia Re untuk memahami landasan hukum, pengertian umum, tujuan dan manfaat, ruang lingkup gratifikasi, penghargaan dari mitra kerja, membina hubungan baik dengan mitra kerja, mekanisme pelaporan serta pemantauan dan sanksi atas pelanggarannya.

Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman ini memuat tentang panduan bagi seluruh insan Indonesia Re untuk memahami tujuan dan manfaat, pengertian umum, pelaporan LHKPN, pemantauan pelaporan LHKPN, hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Perusahaan, dan sanksi atas pelanggarannya.

Sementara itu, dari sisi pengendalian operasional, Perusahaan memiliki pedoman sebagai berikut:

Underwriting Guidelines Pedoman ini memberikan panduan bagi para underwriter Perusahaan dalam bisnis reasuransi.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pedoman ini memuat tentang acuan bagi pelaksana pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan Gratifikasi

Sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG, maka kami menerapkan program pengendalian gratifikasi. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh karyawan kami terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme para stakeholder.

Pada tahun 2021 kami mengadakan sosialisasi melalui media sosial, karena kami menilai bahwa media sosial adalah salah satu platform komunikasi yang paling efektif untuk menyebarkan pesan perusahaan kepada khalayak umum, karena mulai tahun ini kami ingin mengoptimalkan penyampaian pesan tersebut ke seluruh stakeholder serta masyarakat umum. Dalam sosialisasi tersebut kami menegaskan seluruh elemen perusahaan dilarang menerima/meminta gratifikasi berupa hadiah, uang, voucher, parsel, dan fasilitas lain dalan bentuk apapun, baik secars langsung, tidak langsung, tersurat maupun tersirat. Kami menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan melalui email cosecretary@indonesiare.co.id jika ada oknum perusahaan yang meminta/menerima gratifikasi.

Prinsip Dasar Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip utama yang dianut oleh kami, yang meliputi:

01 | **Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi (keterbukaan) tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan merupakan sarana untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku penyelenggaraan negara. Namun demikian, ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

02 | Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

03 | Prinsip Kepastian

Hukum Prinsip ini mengandung makna bahwa proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

04 | Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini terkait dengan aspek pemanfaatan barang gratifikasi, yaitu bahwa barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap suap tetapi terkait dengan kedinasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan sosial.

05 | Prinsip Kepentingan Umum

Prinsip kepentingan umum diwujudkan dari sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Apabila dalam hal tertentu terjadi penerimaan, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap penyelenggara negara yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat umum.

06 | Prinsip Independensi

Prinsip independensi ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan tersebut dapat memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

07 | Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor

Kategori Gratifikasi

Kami membagi kategori gratifikasi sebagai berikut:

01 | Suap

Suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya, antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

a. Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;

b. Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;

c. Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi.

d. Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak mana pun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;

e. Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.

02 | Hadiah

Berbentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya:

a. Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada;

b. Namun hadiah dan cindera mata yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkaitan dengan kegiatan sosial

(social events) yang biasanya terjadi tidak reguler dapat diperkenankan, seperti kegiatan pernikahan;

c. Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban perusahaan pada kondisi antara lain yaitu hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat perusahaan, dan pernyataan simpati;

d. Bantuan berupa barang harus mencantumkan logo/nama Indonesia Re.

03 | Jamuan Bisnis

Yang dapat diterima/diberikan insan Indonesia Re dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerja sama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Insan Indonesia Re dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif.

04 | Donasi

Merupakan sumbangan kepada suatu pihak, lembaga, atau organisasi. Donasi untuk tujuan amal dan dalam batas kepatutan dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pelaporan Gratifikasi

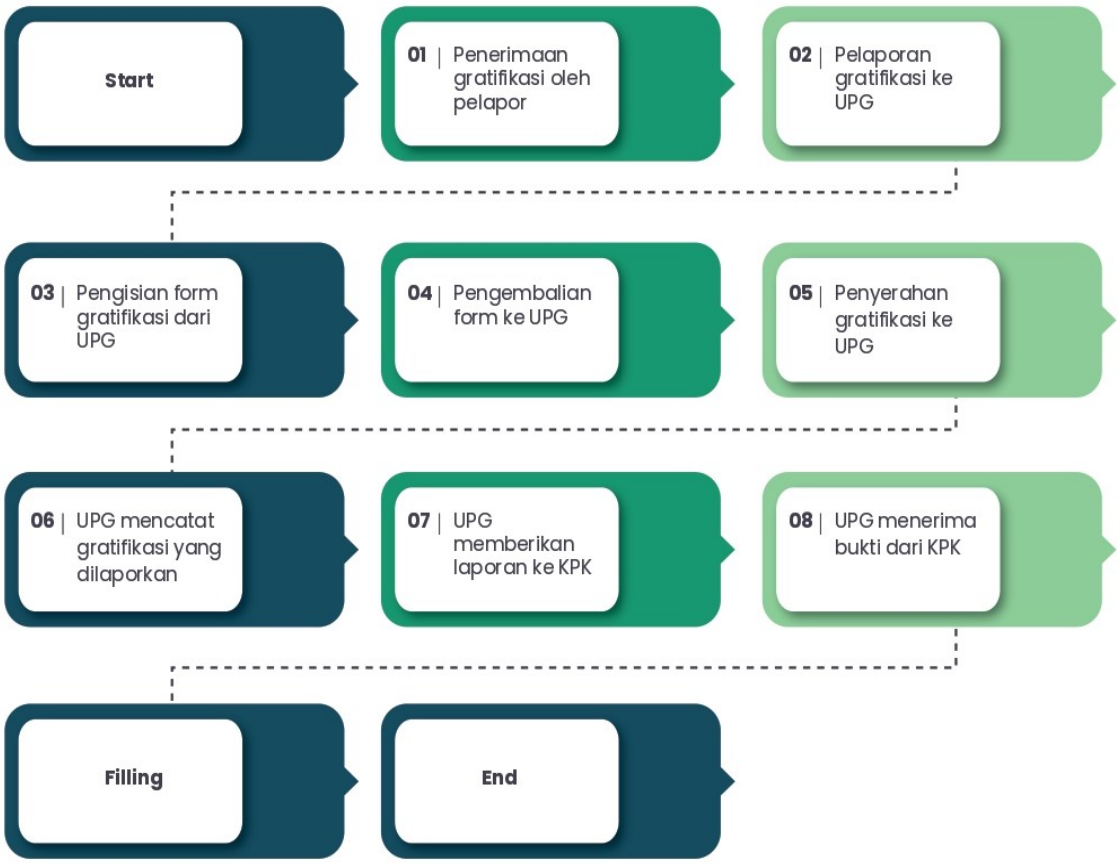

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)

Praktik suap di Indonesia saat ini menjadi isu yang tidak ada habisnya. Masyarakat kerap disajikan informasi mengenai praktik korupsi melalui media massa. Masalah suap juga sudah menjadi isu global. Bank Dunia memperkirakan bahwa lebih dari USD1 triliun dibayarkan dalam bentuk suap setiap tahun. Penyuapan merupakan fenomena yang luas.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyuapan melalui Undang-Undang Nasional serta perjanjian internasional seperti Konvensi PBB melawan Korupsi. Meskipun demikian, masih banyak yang bisa dilakukan salah satunya ialah perubahan kelembagaan dan budaya anti-penyuapan di dalam organisasi. Langkah tersebut dapat berkontribusi secara signifikan pada upaya melawan penyuapan.

Demi mendukung hal tersebut dan juga mendukung implementasi SMAP di BUMN pasca dikeluarkannya surat Menteri BUMN No. S-35/MBU/01/2020 dan Surat No. S-17/S/MBU/02/2020 pada 17 Februari 2020 yang mewajibkan seluruh BUMN membangun,

menerapkan dan melakukan sertifikasi ISO 37001 SMAP. Pada tahun pelaporan kami menerapkan Sistem manajemen anti penyuapan.

Pelaksanaan SMAP tentunya bukan sekadar karena adanya tuntutan eksternal, akan tetapi lebih bersifat menunjukkan keberadaan internal organisasi/perusahaan yang stabil dan mapan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti penyuapan pada tanggal 13 Agustus 2020. Sertifikasi tersebut diberikan oleh PT Asricert Indonesia. Proses sertifikasi tersebut mencakup ruang lingkup Direktorat Utama, Direktorat Teknik Operasi, Direktorat Keuangan & Sumber Daya Manusia dan Direktorat Pengembangan, Manajemen Risiko & Kepatuhan.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sepanjang tahun 2021, kami melakukan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi sebanyak 1 kali yakni pada 08 September 2021 yang dihadiri oleh Direksi dan seluruh karyawan dengan narasumber langsung dari KPK.

Laporan Pengelolaan Gratifikasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, laporan pengelolaan gratifikasi terbatas pada Laporan Tindak Lanjut Internal atas barang terindikasi gratifikasi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Jumlah	Bentuk:	Penyaluran:
17	Makanan	Diperuntukan untuk karyawan secara umum

Jumlah	Bentuk:	Penyaluran:
2	*Various*	Panti Asuhan

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kebijakan Pelaporan LHKPN

Kebijakan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang kami punya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlak, Baik dalam kapasitas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga berkenaan dengan Wajib Lapor Konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Keputusan Direksi tahun 2017 tersebut, pihak yang wajib lapor LHKPN di konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah:

- Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Kepala Divisi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Direksi PT Asuransi Asei Indonesia
- Dewan Komisaris PT Asuransi Asei Indonesia
- Direksi PT Reasuransi Syariah Indonesia
- Dewan Komisaris PT Reasuransi Syariah Indonesia

Sosialisasi LHKPN

Dikarenakan pada tahun pelaporan, Pandemi Covid-19 tak kunjung usai, maka kami tidak melakukan sosialisasi LHKPN.

Pelaporan LHKPN 2021

Pada tahun 2021, berikut rincian Pelaporan LHKPN :

Unit Kerja	Wajib Lapor (WL)	Sudah Lapor	Belum Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	21	19	2	19	0	90%
PT. Asuransi ASEI Indonesia	5	4	1	4	0	80%
PT. Reasuransi Syari'ah Indonesia	6	6	0	6	0	100%

Sanksi Laporan LHKPN

Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Hal tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00700/60. HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Tata Cara Pelaporan LHKPN

Pelaporan LHKPN dilakukan oleh Wajib Lapor secara individual sebelum 31 Maret setiap tahun secara daring (online) melalui website: elhkpn.kpk.go.id Laporan tersebut menggunakan format yang telah ditetapkan serta mekanisme pelaporan pada Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Pelatiha
Digital
untuk
UMKM Go Online

05 Pemangku Kepentingan

Pemangku **Kepentingan**

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [POJK E.4]

Tidak dapat dipungkiri pemangku kepentingan sangat penting bagi kami, karena dalam aktivitas bisnis kami sehari-hari selalu berkaitan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kami, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemegang saham, pegawai, penyewa (lessee), penyedia barang dan jasa, masyarakat di sekitar tempat usaha, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kami wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi

Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Selain melakukan keterbukaan informasi terhadap publik dan pemangku kepentingan lainnya, kami juga berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan dalam komunikasi internal. Hal tersebut juga sebagai upaya dari menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif guna mendukung pencapaian kinerja.

Kami senantiasa menciptakan komunikasi dua arah melalui berbagai media komunikasi, di antaranya ialah Intranet Perusahaan, e-mail blasting, poster, pengumuman melalui pengeras suara internal di setiap ruangan kerja, digital signage dan Group WhatsApp.

Prinsip Dasar

Dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kami mengacu pada prinsip dasar yang mencakup:

- Memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- Mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;
- Mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- Perusahaan bertindak dengan integritas, kompetensi, serta niat yang baik

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Kami memiliki pola hubungan dengan pemangku kepentingan yakni sebagai berikut: .

01	**Hubungan dengan Pemegang Saham**	Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku
02	**Hubungan dengan Karyawan**	Setiap Kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara transparan dan mengakomodasi kepentingan pegawai dengan memperhatikan kondisi Perusahaan Perusahaan akan memperhatikan hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku
03	**Hubungan dengan Tertanggung**	Strategi perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan Perusahaan secara transparan memberikan informasi spesifikasi produk-produk yang disediakan oleh Perusahaan Perusahaan memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan menerapkan suatu sistem penjaminan kualitas jasa, termasuk penanganan keluhan atas jasa melalui mekanisme yang baku dan transparan. Perusahaan memelihara hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan para pelanggan.
04	**Hubungan dengan Penyedia Barang**	Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis bagi Perusahaan.

	Perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik, adil, dan transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.
	Perusahaan memelihara data dan informasi yang mutakhir mengenai penyedia barang dan jasa.
	Perusahaan melakukan evaluasi secara adil dan transparan terhadap penyedia barang dan jasa.
	Perusahaan akan memperhatikan hak dan kewajiban penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
05 Hubungan dengan Masyarakat	Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat pada umumnya.
	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Perusahaan mengembangkan program - program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.
06 Hubungan dengan Pemerintah	Perusahaan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan guna meningkatkan kontribusi pada pembangunan nasional.
07 Hubungan dengan Media Massa	Peran media massa penting untuk menjadi sarana keterbukaan informasi kegiatan Perusahaan

Membangun Komunikasi **dengan Pemangku Kepentingan**

Komunikasi dapat tercapai melalui interaksi timbal balik yang saling mendukung antara kami dengan para pemangku kepentingan. Kami juga membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai media antara lain surat, telepon, email, sosial media sebagai prosedur untuk menangani keluhan dari para pemangku kepentingan khususnya nasabah/ pelanggan.

Selain itu, Indonesia Re bersama BUMN lainnya sudah tergabung dalam jaringan www.lapor.go.id. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Hubungan dengan Pelanggan

Bagi Indonesia Re, kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu indikator dalam mengembangkan dan menumbuhkan roda bisnis Perusahaan. Melalui pelayanan yang baik, efektif dan efisien diharapkan pelanggan merasa puas dan akan terus menjadi mitra kami. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan maka semakin mudah kami mempertahankan pelanggan dan meraih kepercayaan calon pelanggan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggan, Perusahaan merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni "penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan."

Indonesia Re memiliki beragam isu-isu penting berkenaan dengan hubungan antara Perusahaan dan pelanggan, terutama menyangkut dua hal: produk dan layanan. Terkait dengan dua hal ini, Perusahaan selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan hubungan baik yang saling menguntungkan, Perusahaan juga membuka ruang komunikasi dengan pelanggan. Tujuan dari kebijakan ini, antara lain memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam berhubungan dengan Perusahaan, sehingga tercipta harmoni.

Dalam menyusun rumusan tanggung jawab Perusahaan terhadap pelanggan, Perusahaan antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Regulasi tersebut, antara lain mengatur tentang hubungan Perusahaan dengan pelanggan. Selain itu, Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dua regulasi tersebut, di antaranya mengatur tentang hubungan antara Perusahaan dengan nasabah, seperti penyelesaian keluhan atau pengaduan. Selain itu, terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen, terutama terkait dengan layanan yang diberikan.

Guna mengakomodir perlindungan terhadap pelanggan dan sebagai sarana pengawasan yang mudah dan terpadu, Perusahaan telah terhubung pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Fasilitas LAPOR! tersebut berdampak pada tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Perusahaan.

Survei Kepuasan Pelanggan [POJK F.30]

Indonesia Re secara rutin menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan untuk dapat memahami pendapat dan harapan pelanggan. Hal itu merupakan upaya peningkatan kualitas layanan kepada seluruh mitra usaha, baik perusahaan jasa asuransi jiwa, maupun jasa asuransi umum. Hasil survei tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar berbagai keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen demi terjaganya mutu layanan Indonesia Re.

Dengan dilakukannya survei kepuasan pelanggan, Perusahaan dapat mengukur indeks

pelanggan untuk dapat memahami pendapat dan harapan pelanggan. Hal itu merupakan upaya peningkatan kualitas layanan kepada seluruh mitra usaha, baik perusahaan jasa asuransi jiwa, maupun jasa asuransi umum. Hasil survei tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar berbagai keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen demi terjaganya mutu layanan Indonesia Re.

Dengan dilakukannya survei kepuasan pelanggan, Perusahaan dapat mengukur indeks loyalitas pelanggan, mengidentifikasi tingkat kepentingan pelanggan dan persepsi kualitas produk dan pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini sebagai langkah untuk memenuhi harapan pelanggan serta sebagai bahan penyusunan action plan perbaikan kinerja pelayanan Perusahaan.

Pada tahun 2021, kegiatan survei tingkat kepuasan pelanggan dilakukan melalui studi (research) langsung kepada para mitra usaha yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepuasan pelanggan pada tahun buku dan

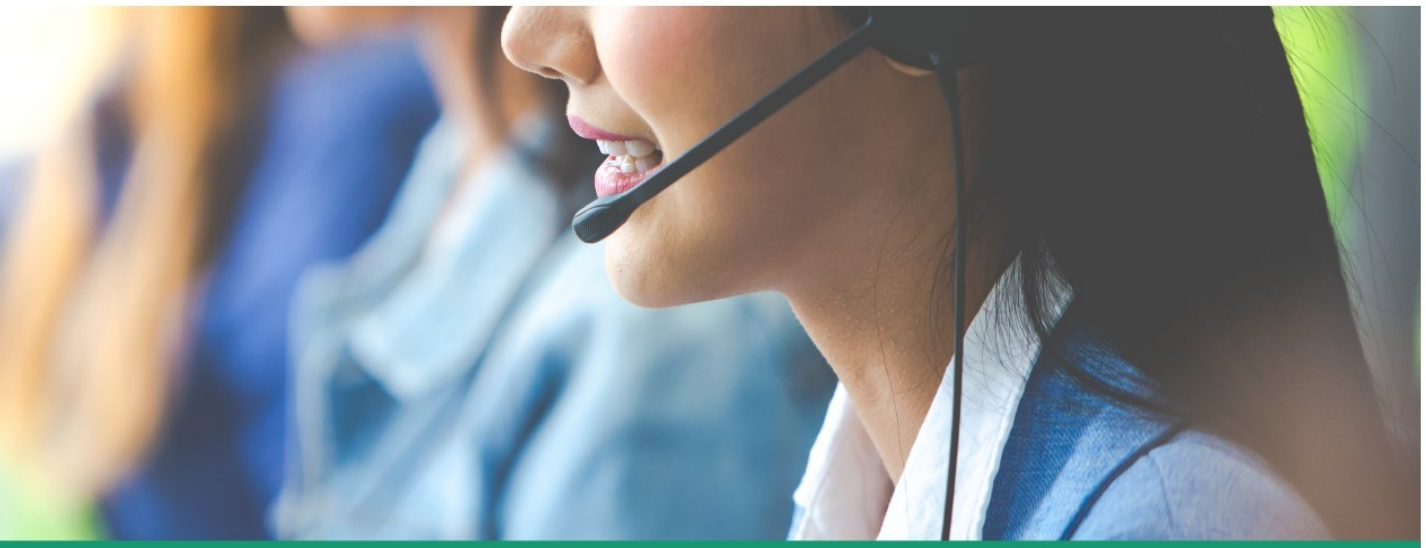

menggambarkan harapan para mitra usaha atas peningkatan kualitas di masa mendatang. Studi dilakukan dengan menangkap pendapat mitra usaha (Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa) secara langsung atas kualitas berbagai aspek layanan Indonesia Re.

Aspek-aspek layanan yang dinilai mencakup:
1. Keuangan
2. Aktuaria
3. Underwriting Facultative
4. Underwriting Treaty
5. Marketing
6. Klaim
7. Administrasi
8. Website
9. Media Sosial
10. Kantor Indonesia Re

Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Google form based survey corporate clients

Survei dilakukan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan kepada target audience melalui google form yang akan diisi mandiri oleh klien
.

1In depth interview

Dilakukan dengan mengunjungi responden di lokasi tertentu dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pendapat, penilaian, masukan, dan harapan responden.

Pelanggan menilai layanan Perusahaan berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan, berdasarkan delapan atribut utama yang kemudian dinilai sebagai "pengalaman layanan" yang dilakukan, baik oleh petugas maupun berbagai bentuk berwujud benda, sarana dan prasarana.

Skala Penilaian

Skala yang digunakan untuk menunjukkan hasil survei adalah 1-5, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah	Kepuasan:	Loyalitas:
1	Sangat tidak puas	Pasti tidak akan menggunakan lagi
2	Tidak puas	Tidak akan menggunakan lagi
3	Biasa saja	Kemungkinan tidak akan menggunakan lagi
4	Puas	Akan menggunakan lagi
5	Sangat puas	Pasti akan menggunakan lagi

Customer Satisfaction Index (

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Indonesia Re tahun 2021 adalah 4,23 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, CSI Indonesia Re tahun 2020 dengan indeks 4,21, mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Sementara itu, untuk CSI Life Insurance turun 0,15 poin, menjadi 4,03 dan CSI General Insurance naik 0,20 poin, menjadi 4,43.

	Customer Satisfaction Index	2021	2020
01	Life Insurance CSI	4,03	4,18
02	Corporate CSI	4,23	4,21
03	General Insurance CSI	4,43	4,23

Customer Loyalty Index (CLI)

Dari hasil survei tahun 2021 indeks loyalitas pelanggan secara korporasi meningkat 0,38 poin menjadi 4,74 dari capaian tahun 2020 yakni 4,36. Angka tersebut masuk dalam kategori "Sangat Baik". Sementara untuk CLI General Insurance dan Life Insurance meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 4,41 menjadi 4,82 dan 4,31 menjadi 4,67.

	Customer Loyalty Index	2021	2020
01	Life Insurance CLI	4,67	4,31
02	Corporate CLI	4,74	4,36
03	General Insurance CLI	4,82	4,41

Net Promotor Score (NPS)

Hasil survei tahun 2021 menunjukkan bahwa skor Corporate NPS mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 38,57 % menjadi 30,06 %. Hal ini disebabkan karena penurunan NPS Life yaitu sebesar 37,40 % menjadi 20 %. Sedangkan NPS General Insurance mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,63% menjadi 40,96%.

Capaian tersebut mengindikasikan keberhasilan Perusahaan, baik dalam bisnis Reasuransi Jiwa maupun Umum, untuk menggeser detractors dalam jumlah yang cukup banyak dan memiliki lebih banyak promoter yang mempromosikan Indonesia Re kepada pihak lain.

	Net Promotor Score	2021	2020
01	Life Insurance NPS	20,00 %	37,40%
02	Corporate NPS	30,06 %	38,57%
03	General Insurance NPS	40,96 %	39,63%

Customer Engagement Index (CEI)

Tingkat korporasi CEI tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,17 poin, menjadi 3,73 yang disebabkan oleh penurunan CEI Life Insurance sebesar 0,18 poin dan CEI General Insurance sebesar 0,14 poin . Secara umum, CEI 2021 menunjukkan bahwa tingkat keterikatan nasabah terhadap Perusahaan dalam kategori baik.

	Customer Engagement Index	2021	2020
01	Life Insurance CEI	3,69	3,87
02	Corporate CEI	3,73	3,90
03	General Insurance CEI	3,78	3,92

Customer Dissatisfaction Index (CDI)

Indeks Ketidakpuasan Konsumen tahun 2021 mengalami penurunan. Tahun lalu, angka CDI Korporasi sebesar 1,99, namun tahun ini menurun menjadi 1,03. Penurunan tersebut juga terjadi di kedua unit bisnis yaitu Life Insurance dan General Insurance, yang turun masing-masing 0,98 poin menjadi 1,06 dan 0,94 poin menjadi 1,00. Menurunnya CDI merupakan tanda membaiknya pelayanan Indonesia Re yang dirasakan oleh nasabah. Kendati demikian, Perusahaan tetap mengharapkan masukan yang membangun agar kualitas layanan terus dapat ditingkatkan.

	Customer Dissatisfaction Index	2021	2020
01	Life Insurance CDI	1,06	2,04
02	Corporate CDI	1,03	1,99
03	General Insurance CDI	1,00	1,94

Dampak Kuantitatif

Dampak kuantitatif dari pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang perlindungan pelanggan yang didapat oleh Perusahaan, antara lain adalah:

Semakin tumbuh kepercayaan yang tinggi dari pelanggan kepada Perusahaan sehingga pelanggan akan semakin loyal.

Tingkat kepuasan nasabah mengalami peningkatan, tercermin dari Customer Satisfaction Index.

Nasabah makin terikat dengan Perusahaan, yang ditunjukkan melalui Customer Engagement Index.

Terbentuknya brand image yang baik bagi Perusahaan di masyarakat.

Diharapkan akan memberikan dampak viral oleh pelanggan yang merasa puas akan layanan Perusahaan.

06 Menjaga Kelestarian Lingkungan

Menjaga Kelestarian **LIngkungan**

Indonesia Re merupakan perusahaan yang bergerak di bidang reasuransi yang dalam operasionalnya tidak berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Namun demikian, Indonesia Re tetap memiliki kepedulian yang besar terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dilandasi atas kesadaran Perusahaan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan.

Komitmen kami untuk memberikan kontribusi terhadap pemangku kepentingan dan juga terhadap lingkungan tertuang dalam SK Direksi No. 00067/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/03/ 2018 bahwa komitmen Indonesia Re menjadi jiwa dari seluruh aktivitas kami dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi nilai tambah bagi kami serta tanggung jawab sosial bagi lingkungan.

Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia Re di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk mengurangi efek negatif dari kegiatan manusia yang bersifat merusak. Kami menyadari bahwa kelestarian lingkungan sangat penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. [POJK F.23]

Dalam kegiatan operasional kami membutuhkan energi listrik, penggunaan kertas dan air. Jika kami menggunakannya dengan tidak bijak, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Terkait dengan upaya di lingkungan internal kami, pendekatan yang kami lakukan adalah dengan menerapkan efisiensi, mulai dari penggunaan kertas bekas serta inisiasi untuk menghemat air dan listrik , dan hal itu selalu kami sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan kami, sehingga menjadi bagian dalam kegiatan operasional kami.

Sedangkan untuk lingkungan di sekitar lingkungan kami, pendekatan yang kami lakukan adalah terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan baik secara langsung oleh kami, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

Target dan Rencana Kegiatan

Pada tahun pelaporan, kami berkomitmen untuk senantiasa memastikan setiap kegiatan yang kami lakukan berdampak positif terhadap lingkungan. Hal tersebut kami lakukan sebagai wujud komitmen kami dalam pelestarian lingkungan. Untuk merealisasikan komitmen kami, Pada tahun pelaporan kami melakukan kegiatan Program Green Konservasi Alam di Jati Luhur – Jawa Barat.

Efisiensi Penggunaan Energi

Dalam operasionalnya, Indonesia Re memanfaatkan energi listrik. Kebutuhan energi listrik Perusahaan utamanya dipasok oleh PT PLN (Persero) dan pada keadaan darurat

Kami menyadari, energi yang digunakan Perusahaan bersumber dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Untuk itu, kami berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi dengan melakukan:

01 Melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan listrik dan meminimalisir konsumsi energi untuk perangkat elektronik di kantor. Pengawasan dilakukan salah satunya dengan cara menugaskan pihak keamanan untuk melakukan pengecekan setiap hari nya untuk melakukan penonaktifan alat elektronik yang sudah tidak digunakan seperti lampu, air conditioner dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak digunakan.

02 Menggunakan perangkat elektronik yang hemat energi misalnya dengan menggunakan lampu LED serta lampu dengan sensor gerak yang akan memutuskan daya listrik secara otomatis ketika tidak digunakan.

03 Dari sisi pengadaan, kami memprioritaskan pembelian alat elektronik berbasis hemat energi.

04 PT Reasuransi Indonesia Utama juga mengatur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik yang besar agar tidak terjadi pemborosan penggunaan energi listrik.

Selain listrik, kami juga menggunakan energi yang berasal dari bahan bakar minyak (BBM). Moda transportasi seperti kendaraan kantor juga menjadi bagian penting untuk mendukung operasional kerja. Tercatat saat ini Indonesia Re memiliki 33 unit mobil dan 3 unit sepeda motor. Efisiensi penggunaan Bahan bakar minyak juga dirasa sangat penting karena selain dapat mengefisiensi biaya juga dapat mengurangi dampak penggunaan BBM yakni memperlambat habis nya SDA tidak terbaharui. Untuk itu Indonesia Re melakukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat melakukan efisiensi penggunaan BBM, diantaranya:

Melakukan servis kendaraan bermotor kantor secara berkala.

Mengetahui beban maksimal setiap kendaraan.

Melakukan pengawasan penggunaan BBM terhadap kendaraan operasional.

Pengelolaan Limbah

Operasional sehari-hari Indonesia Re menghasilkan limbah yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun non-B3. Limbah B3 antara lain serta limbah

elektronik yang tidak terpakai, baterai, dan lainnya. Untuk pengolahan limbah tersebut, Perusahaan menyerahkannya ke pihak ketiga yang berizin. Sementara itu, limbah yang masuk kategori non-B3 antara lain berupa sampah domestik perkantoran.

Untuk menjaga kebersihan, Indonesia Re menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup. selanjutnya, sampah akan dikumpulkan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir oleh pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan Perusahaan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas menjadi salah satu material yang digunakan untuk mendukung operasional Perusahaan. Indonesia Re menyadari, bahwa produksi kertas berasal dari penebangan pohon/hutan, sehingga Perusahaan berupaya untuk terus mengurangi penggunaan kertas dengan menerapkan operasional yang paperless. Hal ini dilakukan dengan berbagai program di antaranya penyebaran surat menyurat internal yang dulunya menggunakan faximile kini beralih ke jaringan intranet.

Seperti diketahui bahwa penggunaan kertas menjadi bagian penting dalam mendukung operasional perusahaan. Kertas digunakan sebagai media pencetakan surat resmi, surat berharga dan kebutuhan lainnya. Namun perlu disadari pula bahwa penggunaan kertas berlebihan ternyata dapat menganggu keberlangsungan lingkungan hidup mengingat bahan baku utama kertas yakni adalah kayu. Oleh karena itu untuk meminimalisir penggunaan kerta Indonesia Re melakukan

strategi sebagai berikut, diantaranya: yang meliputi:

Memanfaatkan kertas bekas pada sisi kertas yang belum terpakai untuk dokumen-dokumen internal.

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi menuju paper less environment.

Mencetak dokumen hanya untuk dokumen yang diperlukan, sehingga tidak ada dokumen yang berlebih.

Pelaksanaan Kegiatan dari Kegiatan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2021 kami turut andil pada sejumlah kegiatan konservasi lingkungan, baik yang dilakukan oleh Kementrian BUMN maupun oleh pihak lainnya. Salah satunya yaitu Program Green Konservasi Alam di Jati Luhur – Jawa Barat.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Kami adalah perusahaan penyedia jasa Reasuransi yang menerapkan sistem business to business (B2B), yaitu menjual produk atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain sehingga tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat atau konsumen. Mengingat bisnis yang dijalankan tidak berhubungan langsung dengan lingkungan, kami belum pernah menerima pengaduan untuk masalah lingkungan, baik secara online maupun ke kotak pengaduan, meskipun sarana untuk pengaduan tersebut tersedia di Indonesia Re.

Adapun pengaduan masalah lingkungan dapat disampaikan ke sarana berikut ini:

Pengaduan nasabah dengan alamat
lapor.go.id

Email Perusahaan:
cosecretary@indonesiare.co.id

07 Menciptakan Sumber Daya Unggul

Menciptakan **Sumber Daya Unggul**

Bagi kami Karyawan adalah organ terpenting yang di Perusahaan, karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Bagi kami semua karyawan adalah unik dan masing-masing mempunyai kekuatan dan kekurangan. Untuk itu, kami sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas karyawan sehingga mereka bisa bekerja secara paripurna. [GRI 103-1]

karyawan merupakan organ yang sangat penting dalam merealisasikan target usaha serta visi dan misi Perusahaan. Sehingga pengelolaan dan pengembangan SDM senantiasa menjadi salah satu perhatian utama kami, mengacu pada roadmap yang telah kami susun.

kami telah memiliki rencana dan strategi pengelolaan SDM yang dibagi menjadi empat ranah di antaranya Implementasi Talent Management, HC Unggul Indonesia Re Maju, Employee *Experience Management,* dan *Employee Retention Program* :

01 | Implementasi Talent Management

New performance management system

Pemetaan kompetensi karyawan

02 | HC Unggul Indonesia Re Maju

Fast track

Competency based development

Pemberian kesempatan pendidikan bagi *top talent*

Inisiasi *knowledge management*

03 | *Employee Experience Management*

Kegiatan penunjang (olah raga dan kerohanian)

04 | *Employee Retention Program*

Pay for performance based

Introducing new bonus scheme

Tantangan

Tahun 2020 hingga tahun 2021 merupakan tahun yang tidak stabil tidak hanya bagi industri asuransi namun bagi perekonomian Indonesia dan dunia. Hal ini disebabkan karena merebaknya pandemi virus COVID-19. Hal ini lah yang menjadi tantangan utama Human Capital Department Indonesia Re dalam menjalankan program-program Human Capital. Terbatasnya mobilitas dan akses membuat beberapa program sedikit melamban dikarenakan harus menyesuaikan dengan keterbatasan tersebut. Namun hal ini harus tidak boleh dijadikan alasan perusahaan untuk menerima keadaan melainkan perusahaan harus beradaptasi dan menyusun strategi kedepan untuk menjawab tantangan Pandemi COVID-19.

Untuk dapat menjawab tantangan hambatan di tahun 2021 yakni Pandemi COVID-19, Human Capital Indonesia Re bergegas menentukan strategi yang tepat untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, program tersebut diantaranya:

01 | Menyusun dan menjalankan skema kerja baru yakni Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) sesuai dengan kebijakan pemerintah Republik Rakyat Indonesia.

02 | Melakukan penyesuaian jam kerja yakni menjadi pukul 09.00 - 15.00 untuk skema WFO dan 08.00 - 17.00 untuk skema WFH.

03 | Bekerja sama dengan TJSL Department melakukan *Swab Antigen Test* rutin yang dilakukan satu bulan satu kali.

04 | Bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Indonesia Re menyusun anggaran bantuan bagi karyawan yang terkena Virus COVID-19.

05 | Menerapkan kebijakan pelatihan dengan hanya menerapkan pelatihan daring atau *online*.

06 | Bekerja sama dengan bagian Corporate Support untuk memfasilitasi karyawan dengan pengadaan Laptop dan Akun Zoom sebagai sarana penunjang WFH.

Program Kerja

Selain strategi yang bertujuan untuk menghadapi tantangan di era Pandemi COVID-19, Human Capital Department Indonesia Re pada tahun 2021 memiliki program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber daya manusia di PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). Diantara program tersebut yakni:

01 Transformasi Human Capital dan Integrated Talent Management System (ITMS)

Dengan melakukan Transformasi Human Capital dan Integrated Talent Management System (ITMS) diharapkan mampu memperkuat kemampuan inovasi produk/solusi reasuransi SDM Indonesia Re. Tim Human Capital menerapkan pengelompokan talent dalam mengelola SDM yang dimiliki. Dalam Fase Persiapan Talent Management, Perusahaan menyediakan kesempatan beasiswa bagi karyawan yang masuk dalam kategori top talent dan ingin mendapatkan pendidikan formal di tingkat S2. Dalam Fase Pengembangan Talent BOD-1 Tim HC telah menyiapkan pengembangan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi BUMN dan dapat menyalurkan talent Indonesia Re untuk menjadi Direksi di Indonesia Re Group.

02 Suksesi : Fast Track

Suksesi Fast Track ditujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan Performa Perusahaan. Tim Human Capital memberikan promosi Jabatan bagi karyawan muda yang masuk ke dalam kelompok Top Talent di 2021 untuk mendukung KPI pemenuhan Millennials dalam level BOD-1 dikemudian hari. Tim HCCS juga menyelenggarakan Seleksi Internal bagi karyawan yang merasa mampu mengisi posisi BOD-1 di tahun 2021.

03 Akselerasi Peningkatan Kompetensi SDM

Dengan Meningkatkan Kompetensi Karyawan diharapkan SDM Indonesia Re dapat menjadi SDM yang unggul di bidang industri asuransi maupun Reasuransi. Tim Human Capital telah melakukan Training Needs Analysis berdasarkan hasil assessment di Desember tahun 2020 dan mengimplementasikannya dalam kurikulum pelatihan yang diberikan per level jabatan, maupun secara menyeluruh (melalui pelaksanaan learning month dan juga webinar).

Roadmap **Pengelolaan SDM**

Kami telah merancang roadmap pengelolaan dan pengembangan SDM sebagai langkah mewujudkan visi, misi, serta target pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Roadmap tersebut sebagai panduan dalam penerapan pengelolaan SDM di Indonesia Re secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk mencetak karyawan yang berkualitas kami mulai dari rekrutmen yang kami lakukan untuk menjaring kandidat terbaik. Rekrutmen kami lakukan secara terbuka, adil, berlaku untuk semua kalangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pandangan politik. Kami memberlakukan semua calon karyawan setara dan tidak ada diskriminasi. [POJK F.18]

Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan secara adil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Tak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kami juga menjamin hak-hak normatif karyawan, seperti memberikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan perusahaan, melakukan review yang adil, memperlakukan semua karyawan secara setara dan tidak ada diskriminasi, dan sebagainya.

01 HR Transformation

02 Talent Acquisition

03 Compensation and Benefit

04 Learning and Development

05 Retention

06 Industrial Relation

07 HR Technology

Selama tahun pelaporan, kami melakukan perekrutan karyawan baru sebanyak 21 orang. Perusahaan melakukan rekrutmen secara terbuka dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan pemberian kesempatan. Setiap orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dapat mengikuti proses rekrutmen. Perusahaan tidak membedakan calon pegawai berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.

Dalam melakukan rekrutmen karyawan, Indonesia Re menggunakan portal www.jobstreet.co.id sebagai portal resmi yang ditunjuk untuk mengunggah lowongan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan karyawan Perusahaan.

Tingkat turn over karyawan Indonesia Re adalah sebesar 7,14 % dengan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 16 orang. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,14 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 4 %. Adapun perkembangan tingkat turn over karyawan dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: [GRI 401-1]

Uraian:	2019	2020	2021
Turn Over Karyawan	9	4	16

Keberagaman Badan Tata Kelola

Selaras dengan prinsip GCG, Kami juga memperhatikan keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman di dalam komposisi badan tata kelola yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjukan dengan salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan perempuan.

Kewenangan untuk mengangkat Komisaris dan Direktur perusahaan merupakan hak dari Pemegang Saham dalam RUPS dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dalam menetapkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, baik dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin serta penerapan kebijakan non diskriminatif. Keberagaman komposisi tersebut juga memperhatikan kebutuhan Perusahaan. [GRI 405-1]

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenjang Pendidikan dan Bidang Studi	Pengalaman dan Keahlian
Yulian Noor	Laki-laki	61 Tahun	S1 Kedokteran Hewan S2 Manajemen QIP AAAIK	Perasuransian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kepemimpinan Perusahaan Pengawasan operasional Perusahaan
Muhammad Tonas	Laki-laki	55 Tahun	S1 Ekonomi CRGP	Birokrasi dan Pemerintahan Bidang Ekonomi
Dadang Iskandar	Laki-laki	57 Tahun	S1 Kesejahteraan Sosial S2 Akuntansi CRGP	Birokrasi dan Pemerintahan Bidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan Sosial

Dwi Pudjiastuti Handyaani	Perempua	56 Tahun	S1 Ekonomi S2 Ekonomi Pembangunan CRGP	Sistem Penganggaran Pemerintah Birokrasi Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Ekonomi

Tabel Keberagaman Direksi

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenjang Pendidikan dan Bidang Studi	Pengalaman dan Keahlian
Benedictus M Waworuntu	Laki-laki	55 Tahun	S1 Psikologi AMRP	Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan Pengelolaan Korporasi Perasuransian
Putri Eka Sukmawati	Perempuan	52 Tahun	S1 Hukum S2 International Banking and Finance Program	Bidang Hukum Bidang Keuangan dan Perbankan Manajemen Perusahaan
Maria Elvida Rita Dewi	Perempuan	50 Tahun	S1 Matematika S2 Finance AMRP MRPP CPLHI FSAI	Aktuaria Akuntansi Manajemen Perusahaan

Erickson Mangunsong	Laki - Laki	53 Tahun	S1 Ilmu Komputer Post Graduate Diploma Asuransi S2 Magister Sains, Ilmu Administras Bisnis Internasional CRGP	Bidang Teknik Perasuransian
Robbi Yanuar Walid	Laki - Laki	51 Tahun	S1 Hukum S2 Hukum Internasional CRGP AMRP	Bidang Hukum Bidang Manajemen Risiko & Kepatuhan Manajemen

Jumlah Karyawan Indonesia Re berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	2019	2021	2020
01	Laki-laki	139	135	132
02	Perempuan	87	84	92
Total		226	219	224

Jumlah Karyawan Baru berdasarkan Usia

	Usia	2019	2021	2020
01	18 - 25 Tahun	21	23	27
02	26 - 35 Tahun	86	80	83
03	36 – 45 Tahun	57	57	55
04	46 – 55 Tahun	55	53	54
05	>55 Tahun	7	6	5
Total		226	219	224

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

	Status Kepegawaian	2019	2021	2020
01	Karyawan Tetap	193	191	197
02	Karyawan Kontrak	33	28	37
Total		226	219	224

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan	2019	2021	2020
01	S2	48	48	45
02	S1	150	144	146
03	D3	15	15	22
03	SMA/ Sederajat	13	12	11
Total		226	219	224

Jumlah Karyawan berdasarkan level Jabatan

	Level Jabatan	2019	2021	2020
01	Kepala Divisi	14	13	13
02	Kepala Departemen	29	31	33
03	Kepala Departemen Fungsional	1	2	2
04	Kepala Unit	24	20	21
05	Kepala Unit Fungsional	48	53	46
06	Staf	51	54	46
07	Fungsional Staf	26	18	27
08	Kontrak	33	28	36
Total		226	219	224

Kesejahteraan Karyawan

Kami selalu berupaya untuk menjamin kesejahteraan karyawan sehingga karyawan akan memberikan dedikasinya bagi perusahaan. Untuk itu Perusahaan menetapkan upah dengan ketentuan yang berlaku, yakni berada di atas upah minimum regional sesuai dengan lokasi Perusahaan berada. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas kepada seluruh karyawan tanpa pengecualian, di antaranya:

- Remunerasi yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan hak cuti bagi karyawan.
- Mengikutsertakan Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemberian tunjangan-tunjangan diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan rumah, dll.

Bantuan dana pendidikan.

Kesempatan kerja yang adil dan kesetaraan gender bagi seluruh karyawan.

Penghargaan Masa Kerja

Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada karyawan tetap yang telah memberikan jasa dan pengabdiannya terhadap perusahaan, maka Direksi memandang perlu untuk memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang tercantum pada SK No. 00894/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Pemberian penghargaan masa kerja tersebut diberikan pada saat acara peringatan hari ulang tahun Indonesia Re setiap tahunnya atau waktu lain yang dianggap lebih sesuai atau tepat. Penghargaan masa kerja kami berikan kepada karyawan tetap dengan ketentuan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penghargaan	Ketentuan Masa Kerja	Nilai Penghargaan
Uang	10 Tahun	50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,25 juta
	15 Tahun	75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,5 juta
	20 Tahun	100% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,75 juta
	25 Tahun	125% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2 juta
	30 Tahun	150% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2,25 juta
Cincin Emas	25 Tahun	15 Gram
	Telah memasuki batas usia pension normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	

Hubungan Industrial

Kami memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui serikat pekerja yang mengacu pada prinsip dasar hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan manajemen.

Hubungan industrial tersebut diwujudkan melalui serikat pekerja. Serikat Pekerja Indonesia Re berdiri berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja No. 704/SP/JP/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017. Serikat Pekerja Indonesia Re mengatur hak dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan melalui "Perjanjian Kerja Bersama". Melalui hubungan ini, kami juga menyerap aspirasi dari karyawan untuk kemudian disusun oleh manajemen serta telah mendapat review dan persetujuan dari Direksi. Pada tahun pelaporan 100 % karyawan yang telah bergabung kedalam serikat pekerja Indonesia Re. [GRI 102-41]

08 Pengembangan Kompetensi Karyawan

Pengembangan **Kompetensi Karyawan**

Sebagai wujud komitmen kami terhadap pengelolaan karyawan, kami senantiasa melakukan evaluasi secara berkesinambungan demi menciptakan keselarasan antara pengembangan karier karyawan dengan tujuan Perusahaan. Pelaksanaan evaluasi memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi melalui penyusunan standar kompetensi jabatan, Direktori Kompetensi Indonesia Re, pembaruan job description secara berkala, job requirement, dan evaluasi terhadap kebijakan promosi karyawan serta kebijakan terkait struktur organisasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Sepanjang tahun 2021, Divisi HC&CS melaksanakan proses promosi dan mutasi internal dalam pemenuhan kebutuhan organisasi dan juga pengembangan karyawan. Hal tersebut berkaitan dengan program evaluasi SDM. Selain itu, Indonesia Re juga memiliki program manajemen karier yang ditujukan untuk jalur karier pegawai (struktural dan fungsional) serta career path karyawan yang akan diintegrasikan dengan anak perusahaan, sehingga terdapat standardisasi dan transparansi jalur karier pegawai dalam suatu grup usaha dalam pengembangan organisasinya. Indonesia Re memiliki kebijakan dasar dalam upaya pengembangan kompetensi dan manajemen karier karyawan yaitu "training for the right man at the right time with the right purpose".

Program Pendidikan dan Pelatihan

Indonesia Re mengembangkan sistem pengelolaan Human Capital yang komprehensif yang mencakup seluruh proses pengelolaan SDM dari perencanaan karyawan hingga mempersiapkan masa purnabakti karyawan.

Indonesia Re secara konsisten mengembangkan kompetensi karyawan dan kami memandang pelatihan dan pengembangan kompetensi merupakan investasi jangka panjang yang mampu memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Berbagai pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan pengembangan kompetensi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil bisnis Perusahaan.

Kami secara konsisten mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dan Manajemen. Pada tahun 2021, dana yang kami keluarkan untuk pendidikan dan pelatihan tercatat sebesar Rp 2,09 Miliar, Realisasi biaya tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, yang sebesar Rp 2,29 miliar. Hal tersebut dikarenakan pandemi yang masih melanda, sehingga pelatihan dan pengembangan yang dapat karyawan kami ikuti hanyalah dengan sistem online.[GRI 103-1] [POJK E.2]

Berikut adalah Pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan yang diikuti oleh Manajemen kami :

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
01.	Budi Setyaso	Enhancing Internal Audit Capability: A Strategy To Safeguard Goals Of State And Regionally - Owned Corporations	Mulai Pelatihan: **10/03/2021** Akhir Pelatihan: **10/03/2021** Lokasi: **Online**	BPKP
02.	Dadang Iskandar	GRC WEBINAR SERIES 2021	Mulai Pelatihan: **25/04/2021** Akhir Pelatihan: **26/04/2021** Lokasi: **Online**	GRC
03.	Muhammad Tonas	CRGP LEVEL IV ISO 31000 & COSO	Mulai Pelatihan: **28/06/2021** Akhir Pelatihan: **29/06/2021** Lokasi: **Online**	RAP
04.	Muhammad Tonas	Pelaksanaan Onboarding Commisioner Program Angkatan 1 Tahun 2021	Mulai Pelatihan: **09/06/2021** Akhir Pelatihan: **30/06/2021** Lokasi: **Online**	Kementrian BUMN
05.	Julian Noor	ASEAN REINSURANCE PROGRAMME 2021 "LIFE & HEALTH REINSURANCE"	Mulai Pelatihan: **01/09/2021** Akhir Pelatihan: **02/09/2021** Lokasi: **Jakarta**	AAMAI

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
06.	Julian Noor	IMPROVING TEH QUALITY OF INSURANCE BUSINESS PRACTICES & OPERATIONS AND ENHANCING TRUST IN THE INDUSTRY "Strengthening the Reliability of General Insurance by Improving the quality of Insurance Business practices and Operations"	Mulai Pelatihan: **18/09/2021** Akhir Pelatihan: **18/09/2021** Lokasi: **Online**	The General Insurance Institute Of Japan
07.	Julian Noor	Seminar IFRS 17 Challenges (Implementation & Risk Management)	Mulai Pelatihan: **10/09/2021** Akhir Pelatihan: **10/09/2021** Lokasi: **Online**	ISEA
08.	Julian Noor	SOPHISTICATION AND QUANTIFICATION OF CORPORATE MANAGEMENT "Strengthening the Reliability of General Insurance by Improving the quality of Insurance Business practices and Operations"	Mulai Pelatihan: **24/09/2021** Akhir Pelatihan: **24/09/2021** Lokasi: **Online**	The General Insurance Institute Of Japan
09.	Julian Noor	THE ROLE OF INSURANCE COMPANIES AS PUBLIC INSTITUTIONS "Strengthening the Reliability of General Insurance by Improving	Mulai Pelatihan: **24/09/2021** Akhir Pelatihan: **24/09/2021**	The General Insurance Institute Of Japan

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
		the quality of Insurance Business practices and Operations"	Lokasi: **Online**	
10.	Julian Noor	Waves of change : Entering Mew Dynamics Of Life Insurance"	Mulai Pelatihan: **11/09/2021** Akhir Pelatihan: **11/09/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
11.	Dadang Iskandar	CREATING OPPORTUNITIES THROUGH RISK MANAGEMENT	Mulai Pelatihan: **26/11/2021** Akhir Pelatihan: **26/11/2021** Lokasi: **Online**	LSPMR
12.	Julian Noor	Refreshment program bagi tim penilai kemampuan dan kepatutan pihak utama industri keuangan nonbank tahun 2021	Mulai Pelatihan: **18/11/2021** Akhir Pelatihan: **18/11/2021** Lokasi: **Jakarta**	OJK

Pengembangan Kompetensi Direktur

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
01.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	Webinar Peran Good Corporate Governance dalam Mendukung Penetrasi Pasar Asuransi Jiwa	Mulai Pelatihan: **08/04/2021** Akhir Pelatihan: **08/04/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
02.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	Onboarding Directorship Program	Mulai Pelatihan: **09/06/2021** Akhir Pelatihan: **28/07/2021** Lokasi: **Online**	FHCI
03.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Extracting Value from Successful Holding Implementation	Mulai Pelatihan: **15/06/2021** Akhir Pelatihan: **18/06/2021** Lokasi: **Online**	PTC
04.	Benny Waworuntu **Posisi:** Direktur Utama	'Extracting Value from Successful Holding Implementation	Mulai Pelatihan: **15/06/2021** Akhir Pelatihan: **18/06/2021** Lokasi: **Online**	Kementrian BUMN

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
05.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Building The Future - Ready Organization	Mulai Pelatihan: **22/06/2021** Akhir Pelatihan: **25/06/2021** Lokasi: **Online**	PTC
06.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan & SDM	Building The Future - Ready Organization	Mulai Pelatihan: **22/06/2021** Akhir Pelatihan: **25/06/2021** Lokasi: **Online**	PTC
07.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan & SDM	PAI CPD Webinar Actuarial System and Modeling	Mulai Pelatihan: **30/06/2021** Akhir Pelatihan: **16/07/2021** Lokasi: **Online**	PAI
08.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan & SDM	PAI CPD Webinar Fungsi Aktuaria di Asuransi Umum	Mulai Pelatihan: **30/06/2021** Akhir Pelatihan: **16/07/2021** Lokasi: **Online**	PAI
09.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan & SDM	PAI CPD Webinar Group Health / Actuary Role in Health Insurance	Mulai Pelatihan: **30/06/2021** Akhir Pelatihan: **16/07/2021** Lokasi: **Online**	PAI

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
10.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan & SDM	PAI CPD Webinar Measurements in IFRS 17 - General Insurance	Mulai Pelatihan: **01/07/2021** Akhir Pelatihan: **30/07/2021** Lokasi: **Online**	PAI
11.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	Mengkaji Dampak COVID-19 Terhadap Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan di Indonesia	Mulai Pelatihan: **14/07/2021** Akhir Pelatihan: **14/07/2021** Lokasi: **Online**	LPMA STMA TRISAKTI
12.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	Inhouse Refreshment CRGP Juli 2021	Mulai Pelatihan: **17/07/2021** Akhir Pelatihan: **18/07/2021** Lokasi: **Online**	Inhouse / RAP
13.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Inhouse Refreshment CRGP Juli 2021	Mulai Pelatihan: **17/07/2021** Akhir Pelatihan: **18/07/2021** Lokasi: **Online**	Inhouse / RAP

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
14.	Benny Waworuntu **Posisi:** Direktur Utama	Inhouse Refreshment CRGP Juli 2021	Mulai Pelatihan: **17/07/2021** Akhir Pelatihan: **18/07/2021** Lokasi: **Online**	Inhouse / RAP
15.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	Media Handling	Mulai Pelatihan: **06/09/2021** Akhir Pelatihan: **07/09/2021** Lokasi: **Online**	Maverick
16.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi	Media Handling	Mulai Pelatihan: **06/09/2021** Akhir Pelatihan: **07/09/2021** Lokasi: **Online**	Maverick
17.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan, Aktuaria dan SDM	Media Handling	Mulai Pelatihan: **06/09/2021** Akhir Pelatihan: **07/09/2021** Lokasi: **Online**	Maverick

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
18.	Robbi Yanuar Walid **Posisi:** Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary	Media Handling	Mulai Pelatihan: **06/09/2021** Akhir Pelatihan: **07/09/2021** Lokasi: **Online**	Maverick
19.	Benny Waworuntu **Posisi:** Direktur Utama	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Business Judgement Rule "Corporate Action or Corruption?"	Mulai Pelatihan: **26/10/2021** Akhir Pelatihan: **28/10/2021** Lokasi: **Online**	PTC
20.	Robbi Yanuar Walid **Posisi:** Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Business Judgement Rule "Corporate Action or Corruption?"	Mulai Pelatihan: **26/10/2021** Akhir Pelatihan: **28/10/2021** Lokasi: **Online**	PTC
21.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Business Judgement Rule "Corporate Action or Corruption?"	Mulai Pelatihan: **26/10/2021** Akhir Pelatihan: **28/10/2021** Lokasi: **Online**	PTC

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
22.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Executive Insight Leadership Series	Mulai Pelatihan: **02/11/2021** Akhir Pelatihan: **04/11/2021** Lokasi: **Online**	PTC
23.	Benny Waworuntu **Posisi:** Direktur Utama	DRIM Webinar 2021	Mulai Pelatihan: **11/11/2021** Akhir Pelatihan: **11/11/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
24.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi	DRIM Webinar 2021	Mulai Pelatihan: **11/11/2021** Akhir Pelatihan: **11/11/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
25.	Maria Elvida Rita Dewi **Posisi:** Direktur Keuangan, Aktuaria dan SDM	DRIM Webinar 2021	Mulai Pelatihan: **11/11/2021** Akhir Pelatihan: **11/11/2021** Lokasi: **Online**	AAJI

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
26.	Erickson Mangunsong **Posisi:** Direktur Teknik Operasi	DRIM Webinar 2021	Mulai Pelatihan: **11/11/2021** Akhir Pelatihan: **11/11/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
27.	Robbi Yanuar Walid **Posisi:** Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary	DRIM Webinar 2021	Mulai Pelatihan: **11/11/2021** Akhir Pelatihan: **11/11/2021** Lokasi: **Online**	AAJI
28.	Benny Waworuntu **Posisi:** Direktur Utama	Re-Insurance Quo Vadis? 17th SIRC	Mulai Pelatihan: **15/11/2021** Akhir Pelatihan: **17/11/2021** Lokasi: **Online**	SIRC + Swiss Re
29.	Robbi Yanuar Walid **Posisi:** Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary	Re-Insurance Quo Vadis? 17th SIRC	Mulai Pelatihan: **15/11/2021** Akhir Pelatihan: **17/11/2021** Lokasi: **Online**	SIRC + Swiss Re

No.	Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Kota	Penyelenggara
30.	Putri Eka Sukmawati **Posisi:** Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi	Re-Insurance Quo Vadis? 17th SIRC	Mulai Pelatihan: **15/11/2021** Akhir Pelatihan: **17/11/2021** Lokasi: **Online**	SIRC + Swiss Re

Business activity of company and subdivisions
Data and prognosis of activity
Detailed information of changing business activity of subdivisions of main company
Subdivision 1
Subdivision 2
Subdivision 3
Product placement in different regions
Main company
Others
Competitors
Subdivisions
Best subdivision value
Value of all subdivisions
The given analytical report allows to estimate to the full a current situation both in all company, and in its divisions separately. It will allow to predict more precisely immediate prospects of development of the company at the account of preservation of positive dynamics of growth.
As a result of investigation of period to do next: raise a break-even sales level, increase incomes of direct sales reduce costs to transportation, strengthen sale divisions, carry out personnel training.
Np
a
dynamics

Setiap karyawan Indonesia Re berhak untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan softskill maupun hardskill yang terkait dengan fungsi pekerjaan setiap individu karyawan dalam rangka peningkatan efektivitas dalam bekerja. Setiap karyawan juga berkewajiban dalam mengelola dan memperkaya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kami memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain karyawan yang berkualitas, kami juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan Indonesia Re. Berikut adalah Rerata Pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan kami :

Pelatihan Indonesia Re 2021 [POJK F.22] [GRI 404-1]

	Uraian	Jumlah Pekerja yang memperoleh pelatihan	Jam pelatihan	Rata-rata jam pelatihan setiap pekerja
01	Keseluruhan	1416	8357,5	5,9
Berdasarkan Jenis Kelamin:				
01	Laki-laki	913	5224,5	5,7
02	Perempuan	513	3133	6,1
Berdasarkan kategori jabatan karyawan :				
01	Eksekutif/Direksi	30	252	8,4
02	Manajer	105	474	4,5
03	Asisten Manajer	285	1803,5	6,3
04	Staff	536	3219	6,01
05	Staff	418	2171	5,2

Penilaian Kinerja Karyawan

Sebagai upaya memenuhi target Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN melalui Komisaris, maka keberadaan Key Performance Indicator (KPI) perusahaan yang disusun oleh Pemegang Saham itu sendiri menjadi sebuah keperluan. Untuk memenuhi hal tersebut yakni dengan memenuhi prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) maka Indonesia Re membentuk Tim Review Key Performance Indicators (KPI) yang tercantum dalam SK Nomor 00895/60.HK.01.01/00/ Indonesia Re/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Hasil dari capaian KPI tersebut kemudian dijadikan indikator penilaian karyawan dengan prosedur penilaian Performance Appraisal yang tercantum dalam SK Nomor 00171/60. HK.01.01/00/Indonesia Re/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019. Pada SK Direksi menetapkan penilaian prestasi kerja yang mencakup penilaian Key Performance Indicator (KPI) dan Penilaian non KPI pada karyawan.

Kami juga harus memastikan proses pengembangan karyawan sesuai dengan rencana perusahaan. Oleh karena itu kami membuat kerangka rencana kerja ketenagakerjaan. Dalam kerangka inilah tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan dirumuskan.

Target dan Rencana Kegiatan

Dalam menyiapkan target dan rencana kegiatan di bidang ketenagakerjaan, kami mengacu pada keadilan dalam mendapatkan kesempatan, baik tempat kerja maupun pengembangan karier. Selain itu, kami juga memberikan dukungan penuh kepada karyawan untuk dapat sejahtera, sejalan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bantuan Dana Pendidikan

Melalui peningkatan kualitas karyawan sebagai investasi jangka panjang yang mampu memberikan dampak positif bagi kinerja Perusahaan yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal

tersebut, kami memberikan bantuan dana pendidikan bagi karyawan. Sepanjang tahun 2021, kami telah memberikan bantuan dana pendidikan sebanyak Rp 2,09 miliar.

Kesejahteraan Karyawan

Kami berupaya untuk menjamin kesejahteraan karyawan sehingga karyawan akan memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahan, mengingat kesejahteraan karyawan merupakan kunci bagi kinerja yang optimal dari karyawan. Jaminan kesejahteraan karyawan salah satunya diwujudkan melalui pemberian upah dengan ketentuan yang berlaku yaitu berada di atas upah minimum provinsi sesuai dengan lokasi kami berada.

Imbalan minimum untuk karyawan kami telah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) Provinsi. Imbalan atas jasa karyawan tetap golongan terendah kami sebesar Rp 6.390.000 ,- lebih tinggi144,88 % dari UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah.[POJK F.20]

Imbalan Jasa Karyawan Indonesia Re 2021

Provinsi/ Daerah:	Upah Minimum Provinsi:	Imbal Jasa Karyawan tingkat terendah:	Presentase:
DKI Jakarta	Rp. 4.410.540,-	Rp. 4.410.540,-	144,88 %

Lingkungan kerja aman dan nyaman [POJK F.21]

Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten maka kami menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Dengan melakukan hal tersebut, kami secara konsisten mematuhi undang-undang yang berlaku, dan pedoman keselamatan serta mematuhi kewajiban untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan dengan upaya-upaya keselamatan kerja yang baik.

Lingkungan kerja yang layak dan aman dapat mendukung kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Kelayakan dan keamanan lingkungan kerja Indonesia Re mencakup kebersihan toilet, ruang makan, alat deteksi asap dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR), tempat ibadah, dan lain sebagainya. [POJK F.21]

Kami juga memastikan tidak adanya praktik tenaga kerja paksa dan juga tenaga kerja anak. Sebagai wujud ketaatan kami dalam praktik ketenagakerjaan Pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan membatasi usia minimal pekerja adalah 18 tahun. [GRI 102-41] [POJK F.19]

09 Tentang Laporan

Tentang **Laporan**

> *kami menerbitkan laporan keberlanjutan untuk memastikan para pemangku kepentingan mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap kinerja kami dalam mengelola dampak operasional di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.*

Dalam rangka mendukung komitmen Indonesia Re terhadap pengembangan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, secara konsisten kami menerbitkan Laporan Keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini merupakan laporan ke-empat yang dipublikasikan oleh kami, dan terus berkesinambungan dengan laporan-laporan berikutnya. Dalam konteks pelibatan pemangku kepentingan, laporan keberlanjutan ini diharapkan dapat mendukung perusahaan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik demi sinergi bisnis yang berkelanjutan.

kami berkomitmen menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun agar para pemangku kepentingan dapat selangkah lebih dekat kepada kami. Laporan Keberlanjutan kami publikasikan melalui portal web resmi perusahaan. Laporan keberlanjutan Indonesia Re mencakup data dan informasi kami berdasarkan ruang lingkup untuk masa pelaporan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang memuat informasi mengenai komitmen, kebijakan, strategi, dan kinerja kami dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan dilengkapi perbandingan kinerja satu atau dua tahun sebelumnya. Dalam pelaporan ini hanya membahas kinerja Indonesia Re saja, tidak terdapat pernyataan kembali (restatement) yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya dan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya. [GRI 102-45] [GRI 102-48] [GRI 102-49] [GRI 102-50] [GRI 102-51] [GRI 102-52]

Kami menerbitkan Laporan ini dalam satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia, dengan menggunakan nominasi Rupiah untuk data finansial. Data finansial yang diungkap dalam laporan ini adalah data yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability), minimal dalam dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren ihwal kinerja Perusahaan.

Laporan ini disusun berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,

Emiten, dan Perusahaan Publik serta Standard GRI (GRI Standards), yang secara resmi berlaku per 1 Juli 2018. Standar GRI adalah rujukan yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) –lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, "Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti". [GRI 102-54]

Agar memudahkan para pemangku kepentingan menemukan disclosure standart yang diaplikasikan, Kami menyajikan disclosure Standar GRI dengan huruf berwarna khusus pada setiap halaman yang relevan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam menemukan informasi terkait untuk setiap pengungkapan. Data lengkap kecocokan informasi Perusahaan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standard GRI disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman XX. [GRI 102-54] [GRI 102-55]

GRI merekomendasikan penggunaan external assurance oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Kami belum melakukan proses verifikasi atau penjaminan (assurance) oleh pihak eksternal atas Laporan ini, karena hal itu bukanlah persyaratan agar dapat "sesuai" dengan Pedoman. Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Kami belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. [GRI 102-56] [POJK G.1]

Kami berharap laporan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui ihwal kinerja keberlanjutan yang dilakukan selama tahun 2020. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, kami menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

Tahap dan Prinsip Pembuatan Laporan

Laporan Keberlanjutan Indonesia Re merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Indonesia Re. Dalam membuat Laporan ini, kami mempertimbangkan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan untuk menjadi acuan dalam menentukan isi Laporan Keberlanjutan. kami juga menjaga Kualitas Laporan dengan mempertimbangkan Keseimbangan, Komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan dalam penyampaian batasan topik material. [GRI 102-46]

Prinsip-Prinsip Penentuan Kualitas Laporan

Dalam menyusun Laporan ini, kami berpatokan pada 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, yaitu:

01 | Keseimbangan

Laporan mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja Perusahaan.

02 | Komparabilitas / Daya Banding

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial pada tahun pelaporan, beserta tahun-tahun sebelumnya agar pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja yang ada.

03 | Akurasi

Laporan disampaikan secara akurat dan terperinci sehingga pemangku kepentingan bisa menilai kinerja yang ada.

04 | Ketepatan Waktu

Laporan disusun secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan Perusahaan.

05 | Kejelasan

Laporan memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dengan pemaparan informasi yang jelas dan gampang dipahami.

06 | Keandalan

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang kebenarannya dapat diuji.

Proses Penetapan Isi Laporan [GRI 102-46]

Pada laporan ini, kami mengidentifikasi topik-topik material yang berdampak terhadap keberlanjutan bisnis kami dan yang penting bagi para pemangku kepentingan kami. Daftar topik material dan batasannya tidak mengalami perubahan dibandingkan laporan sebelumnya.

Topik-topik material yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan ini dipilih berdasarkan prinsip-prinsip penetapan isi laporan dari Standar GRI dengan mempertimbangkan:

01 | Konteks Keberlanjutan

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, kami memperhatikan aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari bisnis kami. Melalui laporan ini, kami menyajikan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan secara luas.

02 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kami mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh operasional bisnis kami serta menanggapi topik dan isu-isu yang relevan dan menjadi perhatian mereka.

03 Materialistis

Kami fokus pada topik-topik relevan dan signifikan bagi perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana topik-topik tersebut juga berpengaruh pada keputusan dan penilaian dari para pemangku kepentingan kami.

04 Kelengkapan

Setiap topik dijabarkan secara menyeluruh agar para pemangku kepentingan kami dapat menilai kinerja perusahaan secara utuh dan objektif. Kami juga memastikan bahwa pengumpulan data bersifat lengkap dan menyeluruh untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Proses penetapan topik material dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan konteks keberlanjutan melalui beberapa tahapan berikut:

01 Tahap Ke-1

Kami Melakukan identifikasi terhadap topik berdasarkan konteks keberlanjutan dan topik penting yang relevan dengan karakteristik bisnis kami, berdasarkan prinsip stakeholders inclusiveness. Setiap topik material ditentukan dampaknya terhadap pemangku kepentingan dan juga batasan ruang lingkupnya. Proses identifikasi ini dilakukan melalui diskusi internal.

02 Tahap Ke-2

Proses penentuan prioritas atas topik-topik keberlanjutan yang akan dilaporkan dilakukan dengan diskusi internal serta membuat prioritas atas aspek-aspek keberlanjutan.

03 Tahap Ke-3

Pada tahap ini, kami melakukan analisis atas topik-topik material sesuai dengan topik spesifik dari Standar GRI yang akan disampaikan bersamaan dengan pendekatan manajemen di laporan ini.

04 Tahap Ke-4

Kami menerima dan menganalisis setiap umpan balik dari laporan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas laporan kali ini.

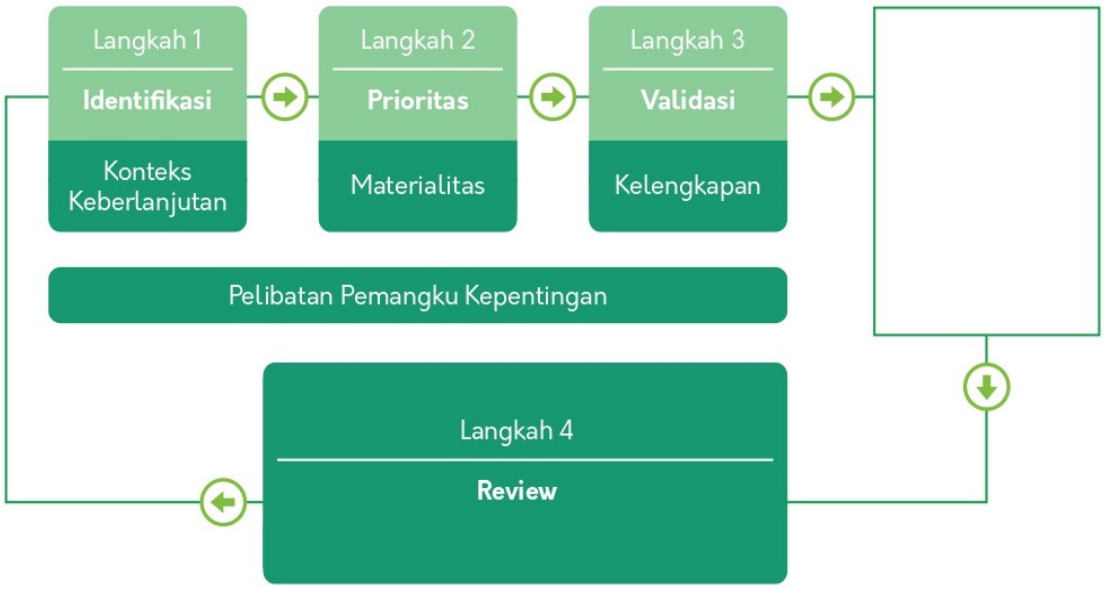

Topik Material

Laporan keberlanjutan ini disusun sebagai wujud komitmen kami dalam menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan. Informasi dalam pelaporan ini merupakan pelaksanaan dan dampak kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Perusahaan selama tahun 2021. Dengan demikian, tidak ada perubahan batasan pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Batasan topik material menjelaskan dampak pengaruh setiap topik material terhadap pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Penetapan material dalam laporan ini disusun berdasarkan survei dan Focus Group Discussion (FGD) pemangku kepentingan internal. Penetapan isi laporan didasarkan pada prinsip stakeholders inclusiveness (pelibatan pemangku kepentingan), materiality (materialitas), sustainability context (konteks keberlanjutan) dan completeness (kelengkapan). Ke- empat prinsip ini sesuai dengan pedoman penulisan laporan keberlanjutan Standar GRI.

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Dengan pertimbangan bahwa topik material Laporan sebelumnya masih relevan dengan perkembangan usaha kami, dan kami berkomitmen untuk mengelola topik material yang menurut kami penting.

Didalam laporan tertuang penjelasan mengenai dampak pada setiap topik material. Tabel berikut adalah merupakan daftar topik material berdasarkan hasil diskusi internal.

Batasan Topik Material [GRI 103-1] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [102-44] [GRI 102-46] [GRI 102-47]

Topik Material	Mengapa topik ini material	Nomor	Boundary			
			Indonesia Re	Mitra Kerja	Pemerintah	Masyarakat
Kinerja Ekonomi GRI-201	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	201-1	X	X	X	X
Dampak ekonomi tidak langsung	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	203 - 1, 203-2	X	X	X	X
Anti Korupsi	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	205 – 2	X	X	X	X
Kepegawaian	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	401 - 1	X	X	X	X
Pelatihan & Pendidikan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	404 - 1	X	X	X	X
Keanekaragaman dan kesetaraan	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan	405 - 1	X	X	X	X

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan dapat tercipta melalui hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh operasional kami dalam berbagai hal. Pengelolaan dan pelibatan pemangku kepentingan merupakan upaya kami untuk memahami harapan para pemangku kepentingan dan memastikan pelibatan dan inisiatif yang kami lakukan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pemangku kepentingan dan perusahaan.

Kami membagi kelompok pemangku kepentingan dengan memperhatikan pengaruh mereka terhadap perusahaan dan begitu pula sebaliknya pengaruh perusahaan terhadap mereka. Bagi pemangku kepentingan, proses pelibatan pemangku kepentingan akan dimaknai sebagai upaya kami untuk memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan. Sedangkan bagi Indonesia Re, interaksi dengan pemangku kepentingan akan menumbuhkan pemahaman yang memadai dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar pemilihan pemangku kepentingan berdasarkan hasil diskusi internal yang dihadiri oleh Tim Penyusunan Laporan Keberlanjutan Indonesia Re dari berbagai bagian di Kantor Pusat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), diskusi ini dilakukan untuk pengidentifikasian topik material untuk Pelaporan Keberlanjutan. Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan interaksi yang sudah terjalin. [GRI 102-42]

Berbagai forum komunikasi formal dan informal terus dijalin agar visi dan misi Perusahaan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mencapai sasaran yang tepat. Berdasarkan forum komunikasi tersebut, Kami telah mengidentifikasi dan menentukan pemangku kepentingan, metode pelibatan, frekuensi pelibatan dan topik/harapan pemangku kepentingan dalam pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut: [GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44]

Tabel Kelompok Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik Utama yang diajukan	Harapan Pemangku Kepentingan
Konsumen	Website Contact Center Kunjungan Langsung Sosialisasi Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan	Setiap Saat	Hubungan Komersial Kualitas Layanan	Memperoleh Informasi Tentang Produk Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Memberikan perlindungan kepada pelanggan
Pemegang Saham Pemerintah	RUPS	RUPS Tahunan dalam satu tahun. RUPS luar biasa saat di perlukan	Pembahan anggaran/ laporan Penanggungjawaban keuangan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris	Perusahaan memiliki kinerja yang unggul dan keberlanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan
Karyawan	Serikat pekerja Pertemuan rutin	Saat diperlukan	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan	Mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, imbalan kerja yang memadai dan memberikan kesempatan untuk berkembang
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Dengar pendapat DPR Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintah	Saat diperlukan	Kontribusi terhadap Negara Kepatuhan terhadap Undang – undang yang berlaku	Perusahaan dapat mencapai rencana kerja yang sudah ditentukan

Mitra Kerja	Kontrak kerja Mitra Investasi Perusahaan Reasuransi lain Perbankan Asosiasi	Saat diperlukan	Hubungan Komersial	Proses pengadaan yang objektif Memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan
Media	Press Realese Media Visit Press Gathering Press conference	Saat diperlukan	Pelaksanaan Program	Narasumber berita yang terpercaya Pemberitaan yang akurat

Akses Informasi atas Laporan Keberlanjutan

Laporan ini ditujukan kepada seluruh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja kami. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki isi dan meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan kami. Oleh karenanya, kami akan sangat berterima kasih jika pembaca dan pemangku kepentingan memberikan masukan atau saran untuk memperbaiki Laporan Keberlanjutan ini. Untuk permintaan, pertanyaan, masukan, dan komentar atas laporan ini, silakan menghubungi:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) [GRI 102-3] [GRI 102-53]

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Telepon: 62-21 3920101
Faksimili : 62-21 3143828
email : cosecretary@indonesiare.co.id

Sales Statistics
APIRL - JULY
A |
B |
C |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL
2021
2022
YOUR TEXT HERE
DATA
GRAPH

10 Lampiran

Pelatihan Tahun 2021

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Actuarial System dan Modeling	5	10	2
Actuary from Zero Online Class – Advance	5	140	28
Actuary from Zero Online Class – Basic	4	112	28
Agile Development	1	10	10
Analisis Risiko Pabrik Baja (steel) Termasuk Analisis Klaim dan Solusi Reasuransi Sejalan dengan Tujuan POJK 44/2020 terkait Perusahaan	2	14	7
Assessment Center Assessor Certification (ACAC)	1	42	42
Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	30	240	8
Big Data Analysis with Phyton	1	16	16
Brevet A & B	1	128	128
CEO TALKS #3 – Handry Satriago	183	183	1
CEO TALKS #4 – with Dian Ediana Rae	183	183	1
Creative Thinking Technique – Batch 5	23	276	12
Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel	26	624	24
Digital Public Training Interprestasi dan Asesor KPKU BUMN	2	42	21

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Diskusi & Sharing Manajemen Risiko & Asuransi : Mengelola Akseptasi Risiko Pabrik Kertas dan Solusi Asuransi dan Reasuransinya	1	3	3
Effective Business Communication	42	672	16
Effective Desk Collection Strategy	3	30	10
Enhancing Your Personal Effectiveness	18	144	8
FINNON : Understanding Financial Statement	12	180	15
Fungsi Aktuaria di Asuransi Umum	1	2	2
Generation Gap Communication & Understanding People	27	216	8
Group Health / Actuary Role in Health Insurance	8	16	2
Health talk COVID-19 dr. Reisa B. Asmoro	183	193	1
Inhouse Online Training Creative Thinking Technique – Batch 1	20	240	12
Inhouse Online Training Creative Thinking Technique – Batch 2	19	228	12
Inhouse Online Training Creative Thinking Technique – Batch 3	20	240	12
Inhouse Online Training Creative Thinking Technique – Batch 4	19	228	12
Inhouse Refreshment CRGP Juli 2021	11	176	16
Inhouse Trainning Basic Insurance dan Reinsurance	14	18	4

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Interprestasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	30	240	8
IT Project Management	1	24	24
Leaders Talk with Rene Suhardono	195	390	2
Legal & Compliance Forum ke-2 Tahun 2021	2	4	2
Live Virtual Class Scrum.org Professional Scrum Master (PSM1)	1	16	16
Measurement in IFRS 17 – General Insurance 3	3	18	6
Mengkaji Dampak COVID-19 Terhadap Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Indonesia	2	4	2
Online Training Creative Cashflow Reporting	2	32	16
Pelatihan & Sertfikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan III	2	64	32
Pelatihan & Workshop Investigasi dan Penanganan Penyuapan berdasarkan SMAP ISO 37001:2016	24	336	14
Pelatihan AntiKorupsi : Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan serta	10	70	7
Pelatihan Audit Internal untuk Persiapan Surverllance ISO 270001	6	192	32
Pelatihan Calon Assessor LSP HCMI	1	24	24
Pelatihan dan Sertifikasi CRMO 2021	15	420	28
Pelatihan dan Sertifikasi CRMO November 2021	15	382.5	25.5
Pelatihan dan Sertifikasi Finacial Risk Management	3	207	69

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Public Relations 2021 (Angkatan IV)	3	42	14
Pelatihan dan Sertifikasi Registered Securities Analyst (RSA) Batch 41	1	25	25
Pelatihan dan Sertifikasi K3 MiGas	1	24	24
Pelatihan Sistem Penyuapan & Workshop Audit	24	240	10
Pendidikan Profesionalisme FSAI	1	11	11
Perumusan Pasal Penyelesaian Sengketa dalam Kontak dan Pemahaman Penyelesaian	1	4	4
PSAK Boot Camps 2021	2	64	32
Reinsurance Business Simulation	12	108	9
Reinsurance Market Update	3	9	3
Seminar Nasional BUMN Untuk Siapa?	3	96	32
Sharing Session Perpajakan 2021	4	8	2
Training & Sertifikasi Certified Professional Management Skill (CPMS)	3	36	12
Vaccine Health Talk with dr. Reisa Broto Asmoro	181	541	3
Virtual Seminar 7th AAUI International Insurance Seminar	6	48	8
Webinar Jejaring Kerja Keprotokolan, Biro Protokol, dan Kerumahtanggaan, Sekretariat Wakil Presiden Batch 3	2	6	3
Webinar Using Artificial Intelligence to Detect and Prevent Claims Fraud	4	8	2

Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Rerata Jam Pelatihan/Pekerja
What is Professional Liability Insurance	1	5	5
Workshop Actuarial Report / Financial Condition Report (FRC)	1	5	5
Workshop IFRS 17	3	33	11
Workshop Online Asuransi Kredit dan Pejaminan Kredit	1	5	5
Workshop Resturkturisasi Korporasi – Aspek Strategis	1	4	4

Total Orders
13,678
Total Sales
11,892
Total Profit
$6,789
5.67%
10.75%
35.7 %
16.8%
23.6%
ANALYSIS 2
ANALYSIS 3

11 Indeks Isi GRI [GRI 102-55]

Standar GRI	No. Indeks	Keterbukaan (Disclosure)	Halaman
Pengungkapan Umum			
GRI 102: Pengungkapan Umum	**Profil Organisasi** | Organization Profile		
	102-1	Nama organisasi	18
	102-2	Kegiatan, Merek, produk, dan jasa	18
	102-3	Lokasi Kantor Pusat	18
	102-4	Lokasi operasi	18
	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	19
	102-6	Pasar yang dilayani	21
	102-7	Skala organisasi	23
	102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya	57 - 63
	102-9	Rantai pasokan	23
	102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	99
	102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan	91
	102-12	Inisiatif eksternal	22
	102-13	Keanggotaan asosiasi	22
	Strategi		
	102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	9 - 16
	Etika dan Integritas		
	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	25
	Tata Kelola		
	102-18	Struktur tata kelola	87- 89
	Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	104
	102-41	Perjanjian perundingan kolektif	64
	102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	103
	102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan	104
	102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan	104

	Praktik Pelaporan|Reporting Practices		
	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	99
	102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik	100
	102-47	Daftar topik material	101
	102-48	Penyajian kembali informasi	99
	102-49	Perubahan dalam pelaporan	99
	102-50	Periode pelaporan	99
	102-51	Tanggal laporan terbaru	99
	102-52	Siklus pelaporan	99
	102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	103
	102-54	Klaim bahwa laporan sesuai dengan standar GRI	98
	102-55	Indeks isi GRI	98
	102-56	Pemeriksaan oleh pihal eksternal	98
Pengungkapan Topik Spesifik			
Aspek Ekonomi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen	**Kinerja Ekonomi**		
	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	31
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	31
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	31
GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	31
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	42
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	42
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	42
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	42
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	43
	Anti-Korupsi		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	93
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	93

	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	93
GRI 205: Anti-korupsi	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang anti-korupsi	93
Aspek Sosial			
GRI 103: Pendekatan Manajemen	**Kepegawaian** | Employment		
	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	56
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	56
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	56
GRI 401: Kepegawaian	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	65
	Pendidikan dan Pelatihan | Education and Training		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	67
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	67
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	67
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan	404-1	Rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun	68
	Privasi Pelanggan		
GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	95
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	95
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	95
GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1	Keluhan terhadap pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	96
Aspek Lingkungan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen	**Energi**		
	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	50
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	50
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	50
GRI 302: Energi	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi | Energy Consumption within the organization	52

Referensi POJK 51

	Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:	Halaman
1.	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	08-10
2.	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
	a. Aspek ekonomi	
	1 Kuantitas produksi atau jasa yang dijual;	5
	2 Pendapatan atau penjualan;	5
	3 Laba atau rugi bersih;	5
	4 Produk ramah lingkungan; dan	5
	5 Pelibatan pihak local yang berkaitan dengan proses bisnis Keberlanjutan	6 - 7
	b. Aspek lingkungan Hidup	
	1 Penggunaan energi (antara lain listrik dan air);	6
	2 Pengurangan emisi yang dihasilkan;	6
	3 Pengurangan limbah dan efluen;	6
	c. Uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	44, 48, 71
3.	Profil Singkat	
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perusahaan;	25
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahhaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan;	18
	c. Skala usaha, meliputi:	
	1 Total asset atau kapitalisasi asset, dan total kewajiban;	23
	2 Informasi mengenai karyawan;	23
	3 Persentase kepemilikan saham (public dan pemerintah);	19
	4 Wilayah operasional.	18
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	18

	e.	**Keanggotaan pada asosiasi;**	**22**
	f.	**Perubahan signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.**	**99**
4.	Penjelasan Direksi memuat:		
	a.	**Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:**	
	1	Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan;	10
	2	Penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan keberlanjutan;	10
	3	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan keberlanjutan;	9
	4	Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan; dan	11 - 14
	5	Tantangan pencapaian kinerja penerapan berkelanjutan.	15
	b.	**Penerapan berkelanjutan**	
	1	Pencapaian kinerja penerapan keberlanjutan (ekonomi, social, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan	11 - 14
	2	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Bekerlanjutan).	15
	c.	**Strategi pencapaian target**	
	1	Pengelolaan risiko atas penerapan keberlanjutan terkait aspek ekonomi, social,dan Lingkungan Hidup;	91
	2	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha;	16
	3	Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi kebebrlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	10
5.	Tata Kelola Keberlanjutan		
	a.	**Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keberlanjutan;**	**87**
	b.	**Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keberlanjutan;**	**90**
	c.	**Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan keberlanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam memngelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen ririko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;**	**91**
	d.	**Penjelasan mengenai pemangku kepentingan:**	
	1	Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau ainnya; dan	103 - 105
	2	Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keberlanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	103 - 105

e.	**Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan keberlanjutan.**		**45**
6.	Kinerja Keberlanjutan		
a.	**Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK. Emiten, dan Perusahaan Publik.**		**32**
b.	**Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terahir meliputi:**		
1	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan		**32**
2	Perbandingan tergat dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keberlanjutan.		**35 - 36**
c.	**Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:**		
1	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan atauu jasa yang setara kepada konsumen;		**39**
2	Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:		
	a	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;	**64**
	b	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;	**64**
	c	Lingkungan bekerja yang layak dan aman;	**70**
	d	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	**67**
3	Masyarakat, paling sedikit memuat:		
	a	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar;	**72**
	b	Mekanisme dan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti;	**95**
	c	TJSL pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat;	**83**
	d	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
7.	Verifikasi Terlulis dari Pihak Independen, jika ada		

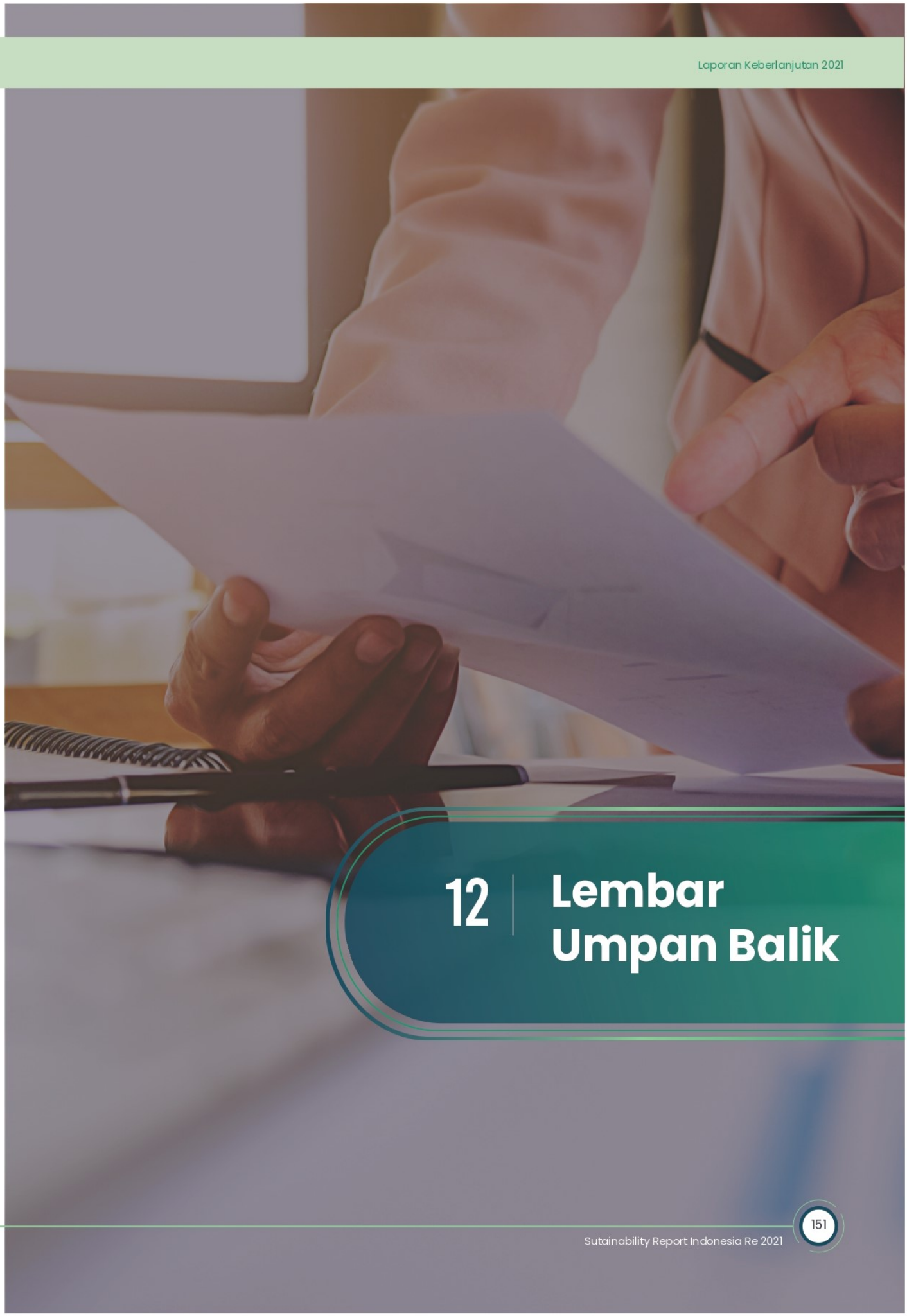

12 Lembar Umpan Balik

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan Indonesia Re tahun 2020. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan, meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan dan sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Kami berharap Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan dan mengirimkannya kembali kepada kami.

01

Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia Re

- Setuju
- Tidak Tahu
- Tidak Setuju

02

Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara terstruktur, mudah dimengerti dan mudah dipahami?

- Setuju
- Tidak Tahu
- Tidak Setuju

03

Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara lengkap, transparan dan berimbang?

- Setuju
- Tidak Tahu
- Tidak Setuju

04

Apakah design, jenis font, ukuran, tata warna, tata letak dan gambar dalam Laporan ini menarik dan mudah dibaca?

- Setuju
- Tidak Tahu
- Tidak Setuju

05

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan paling bermanfaat?

_____

_____

06

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan kurang bermanfaat?

_____

_____

07

Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan mendatang?

_____

_____

Profil Pembaca

Nama Lengkap _____

Nama Institusi/Perusahaan _____

Email _____

Identifikasi kelompok pemangku kepentingan (pilih salah satu):

- ○ Pemerintah
- ○ Industri
- ○ Media
- ○ Lain-lain, Mohon Sebutkan _____
- ○ LSM
- ○ Akademik
- ○ Masyarakat

Kami menghargai saran dan tanggapan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada kami atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini. Untuk menyampaikannya, mohon lembar umpan balik ini dikirimkan kembali kepada: [GRI 102-53]

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) [GRI 102-3]
Jl. Salemba Raya No.30,
Jakarta Pusat 10430

62-21 3920101
62-21 3143828
cosecretary@indonesiare.co.id